



RENCANA KERJA 2026

PEMERINTAH KOTA MEDAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pinang Baris No. 114, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8458994 - 8452022, Faksimile (061) 8452022,
Laman dlh.medan.go.id, Pos-el dlh@medan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
NOMOR : 000.1-2.6/2057

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan; perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tentang Tim Penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 1 tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 9).
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Wali Kota Medan Nomor : 900/03.K tanggal 11 Desember 2024 tentang Pejabat yang diberi Wewenang Selaku Pelaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan;
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menimbang : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TENTANG TIM PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN.**

KESATU : **Membentuk Tim Penyusunan Renja Tahun Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dengan Susunan Anggota sebagai berikut :**

Pelaksana Kegiatan

a. Pengarah Tim : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

b. Ketua : **Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

c. Anggota :

1. Sekretaris :

a) Kepala Sub Bagian **Perlengkapan** dan Umum;

b) Kepala Sub Bagian **Penyusunan Program**;

c) Ketua Tim Kerja **Lingkup Keuangan**;

d) Staf Jabatan **Fungsional**; dan

2. Kepala Bidang **Tata Lingkungan** :

a) Ketua Tim Kerja **Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**;

b) Ketua Tim Kerja **Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup**;

c) Staf Jabatan **Fungsional**; dan

3. Kepala Bidang **Pengelolaan Sampah & Limbah B3** :

a) Ketua Tim Kerja **Lingkup Pengurangan Sampah**;

b) Ketua Tim Kerja **Lingkup Penanganan Sampah**;

c) Ketua Tim Kerja **Lingkup Limbah B3**;

d) Staf Jabatan **Fungsional**; dan

4. Kepala Bidang **Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** :

a) Ketua Tim Kerja **Lingkup Pemantauan Lingkungan**;

b) Ketua Tim Kerja **Lingkup Pencemaran Lingkungan**;

c) Ketua Tim Kerja **Lingkup Kerusakan Lingkungan**;

d) Staf Jabatan **Fungsional**; dan

5. Kepala Bidang **Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** :

a) Ketua Tim Kerja **Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**;

b) Ketua Tim Kerja **Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan**;

c) Ketua Tim Kerja **Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**;

d) Staff Jabatan Fungsional; dan

6. UPT


KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun :

1. Pengarah mempunyai tugas pokok :
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Renja 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
2. Ketua mempunyai tugas pokok :
 - a. Bertanggung jawab terhadap Pengarah Kegiatan dalam menjalankan arahan dan petunjuk yang mendukung;
 - b. Melaksanakan arahan, petunjuk dari Pengarah terhadap Kegiatan Penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
 - c. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada pengarah selaku pengguna anggaran secara berkala serta melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan tersebut.
3. Anggota mempunyai tugas pokok :
 - a. Membantu Ketua dalam menyelesaikan draft Penyusunan Renja 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
 - b. Membantu Ketua dalam menjalankan seluruh kegiatan;
 - c. Membantu Ketua mempersiapkan proses administrasi yang diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir apabila tugas-tugas telah selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup


Melvi Marlabayana, S.T., M.Si
Kepala Dinas
NIP 197707061996022001

Tembusan :

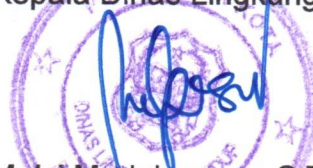
1. Bapak Wali kota Medan (sebagai laporan);
2. Personil yang bersangkutan;
3. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2026. Penyusunan Renja merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Medan Nomor 99 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025-2029 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja menjabarkan tentang tujuan, sasaran, target, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya terkait lingkungan hidup yang mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerja dalam melayani publik.

Medan, 31 Oktober 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Melvi Marlabayana, S.T., M.Si
Kepala Dinas
NIP 197707061996022001



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.3.1. Maksud	9
1.3.2. Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	12
2.1.1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tabel TC 29	24
2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra OPD	40
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.3 Isu-lisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	42
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025	63
2.5 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat RPJMD 2021-2025.....	71
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	74
2.7 Data Terpilah Pengarusutamaan Gender Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	81
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	83
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	83
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	100
3.3. Program dan Kegiatan.....	101

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN	
2026.....	139
4.1 Program dan Kegiatan	139
4.2 Penerapan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di	
Kota Medan.....	150
BAB V PENUTUP	151

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	3
TABEL I.2	Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan.....	5
TABEL I.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	5
TABEL II.1	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	13
TABEL II.2.	Kriteria dan Parameter IKLH periode 2020-2024.....	14
TABEL II.3	Kondisi BAU dan target Penurunan GRK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020	15
TABEL II.4.	Emisi Gas Rumah Kaca 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup...	16
TABEL II.5.	Aksi Mitigasi Usulan dan Rencana.....	16
TABEL II.6.	Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2024 Periode I.....	19
TABEL II.7	Roadmap menuju Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	19
TABEL II.8	Roadmap Menuju Peningkatan Cakupan Area Pelayanan Persampahan.....	21
TABEL II.9	Roadmap Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga.....	23
TABEL II.10	Road Map Peningkatan Nilai Sakip.....	24
TABEL II.11	Target Nilai SAKIP DLH tahun 2024 BB (72) yang menjadi Perjanjian Kadis Lingkungan hidup tahun 2025.....	24
TABEL II.12	(TC. 29) Evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024.....	25
TABEL II.13	(TC.30) Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	41
TABEL II.14	Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025 – 2029	43
TABEL II.15	Tantangan Pengelolaan Lingkungan Di Kota Medan	45
TABEL II.16	Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024	48
TABEL II.17	Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Tahun 2024.....	64
TABEL II.18	Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2026 Kota Medan Dinas Lingkungan Hidup.....	66

TABEL II.19	Pencapaian Target RPJMD Kota Medan 2021-2024 untuk Misi Keempat.....	73
TABEL II.20	Usulan Musrenbang Kecamatan Kota Medan Tahun 2025	75
TABEL II.21	Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dprd Kota Medan Tahun 2025	78
TABEL II.22.	Data Gender Pada Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2024.....	81
TABEL III.1	Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Medan dengan Provinsi Sumatera Utaradan Nasional	84
TABEL III.2	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kota Medan dengan RPJPD Kota Medan.....	84
TABEL III.3	Keterkaitan Misi RPJMD Kota Medan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia	85
TABEL III.4	Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap Asta Cita Presiden	87
TABEL III.5	Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap 17 Prioritas Nasional	89
TABEL III.6	Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat.....	90
TABEL III.7	Dukungan Terhadap Visi Misi Wali Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	92
TABEL III.8	Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Medan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.....	96
TABEL III.9	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kota Medan dengan RPJPD Kota Medan.....	97
TABEL III.10	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2025-2029	97
TABEL III.11	Dukungan Terhadap Visi Misi Walikota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	102
TABEL III.12	Indikator SDGs untuk I-SIM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	106
TABEL III.13	Matrik Rencana Aksi Tahun 2024 Penanggulangan Kemiskinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	110
TABEL III.14	Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Tahun 2024 TW 1 dan 2	111

TABEL III.15	Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 (Tahun Berjalan).....	114
TABEL III.16	(TC. 33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Medan.....	125
TABEL IV.1	Rencana Kerja 2026.....	144
TABEL IV.2	Timeline Penyusunan Amdal Pembangunan Psel Kota Medan Tahun 2026.....	159
TABEL IV.3	Perkiraan Waktu Pelaksanaan Perluasan TPA	159

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 (Air, Udara dan Lahan)	42
GAMBAR IV.1	Ringkasan Rencana Solusi Inovatif Pengelolaan Sampah Kota Medan	155
GAMBAR IV.2	Pengelolaan Sampah di TPA Terjun	156
GAMBAR IV.3	Peta Lokasi perluasan TPA Terjun	157

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh PD dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai tupoksinya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah wujud implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Perangkat Daerah dari Pemerintah Kota Medan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pemerintah Kota Medan. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2026 berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah meliputi

: Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat Daerah/ lintas Daerah Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 74 dan pasal 126 mengamanatkan bahwa tahapan awal dalam penyusunan Renja adalah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2026. Rencana Kerja tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Penjabaran Visi Misi Walikota dalam RPJMD Kota Medan, sehingga program dan kegiatan prioritas Walikota dapat tertampung pada Rencana Kerja dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.
2. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dapat lebih optimal.
3. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah- masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2024 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025.
4. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan

tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

5. Mempertimbangkan sinergitas antar sector dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Walikota Medan tahun 2025 – 2029, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2025-2029 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2026 serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2025-2029.

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang selanjutnya disingkat DLH Kota Medan pada September 2025 sebanyak 296 orang.

TABEL I.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	0	1	1
2	Sekretaris Dinas	0	1	1
	2.1 Sub Bagian Perlengkapan & Umum	0	1	1
	2.3 Sub Bagian Program	0	1	1
	2.2 Tim Kerja Lingkup Keuangan	1	0	1
	2.2.1 Bendahara Penerimaan	0	1	1
	2.2.2 Bendahara Pengeluaran	0	1	1
	2.2.3 Pengurus Barang	1	0	1
	2.4 Jabatan Fungsional	0	1	1
	2.5 Jabatan Pelaksana	2	12	14
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan	0	1	1
	Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, 3.1 Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	0	1	1
	3.2 Tim Kerja Kajian Dampak Lingkungan	1	0	1
	3.3 Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup	0	1	1
	3.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	3.5 Jabatan Pelaksana	7	6	13
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	0	1
	4.1 Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah	1	0	1

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	4.2 Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah	1	0	1
	4.3 Tim Kerja Lingkup Limbah B3	0	1	1
	4.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	4.5 Jabatan Pelaksana	20	4	24
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	1	1
	5.1 Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan	0	1	1
	5.2 Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan	1	0	1
	5.3 Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan	1	0	1
	5.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	5.5 Jabatan Pelaksana	5	5	10
6	Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	0	1
	6.1 Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	1	0	1
	6.2 Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan	0	1	1
	6.3 Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	0	1	1
	6.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	6.5 Jabatan Pelaksana	7	15	22
7	Kepala UPT.Lab	1	1	2
	7.1 Jabatan Fungsional	0	0	0
	7.2 Jabatan Pelaksana	0	2	2
8	PPPK	6	10	16
9	Tenaga Non ASN	107	42	149
10	Tenaga Alih Daya	14	5	19
	Total Jumlah Pegawai	179	117	296

Sumber : Subbag Perlengkapan dan Umum Dinas Lingkungan Hidup September 2025

Dari komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Keseluruhan Berjumlah 296 orang terdapat :

- 112 (seratus tiga belas) orang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 16 (enam belas) orang berstatus PPPK
- 149 (seratus delapan puluh) orang berstatus Tenaga Non ASN
- 19 (Sembilan belas) orang berstatus Tenaga Alih Daya

TABEL I.2
Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	No	Uraian
1	0 Orang berpendidikan S-3	5	1 Orang berpendidikan D-1
2	25 Orang berpendidikan S-2	6	114 Orang berpendidikan SMA
3	122 Orang berpendidikan S-1	7	8 Orang berpendidikan SMP
4	13 Orang berpendidikan D-3	8	13 Orang berpendidikan SD

Sumber : Subag Perlengkapan dan Umum Dinas Lingkungan Hidup September 2025

TABEL I.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									Total
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Strata-2	1	3		1	4	5	2	8	1	25
	Strata-1		5	5	1	10	10	18	18	3	70
	Diploma-3		1		1	1					3
	Diploma-1										
	SMU/Sederajat			4	1			10			14
	SMP/Sederajat										
	SD/Sedrajat										
2	PPPK										
	Strata-1							1			1
	Diploma-3										
	Diploma-1										
	SMU/ Sederajat		2		2			11			15
	SMP/ Sederajat										
	SD/Sederajat										
3	Tenaga Non ASN										

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									Total
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
	Strata-1		3	13	1	1	2	24	1		45
	Diploma-3			1		1		6	1		9
	Diploma-1							1			1
	SMU/ Sederajat			13			1	56	3		73
	SMP/ Sederajat			3				5			8
	SD/Sederajat			4				9			13
4	Tenaga Alih Daya										
	Strata-1		1	1				4			6
	Diploma-3							1			1
	Diploma-1										
	SMU/ Sederajat			1				11			12
	SMP/ Sederajat										
	SD/Sederajat										
	Jumlah	1	14	45	7	17	18	159	31	4	296

Sumber : Subbag Perlengkapan dan Umum Dinas Lingkungan Hidup September 2025

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yg sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yg sebagaimana telah diubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
17. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Permen PAN & RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2026 ini dimaksudkan :

1. Sebagai dokumen awal perencanaan pembangunan Kota yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang di sertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
2. Memberikan arah pedoman penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3. Sebagai Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tentang arah perencanaan pembangunan kedepannya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2026 ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan kota yang transparan dan akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan kota agar lebih terarah, efektif dan efisien.
3. Mendukung program Walikota Medan di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2026, disusun dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang :

Latar Belakang, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Dasar Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang :

Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2024 mengacu pada APBD yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

Capaian Program Tahun 2024 berisikan pencapaian program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk tahun 2024 dan program kegiatan dan sub kegiatan apa yang tidak dilaksanakan beserta alasannya.

Capaian Penetapan Kinerja (TAPKIN) berisikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta berdasarkan Ketetapan Kinerja (TAPKIN).

Analisis Kinerja Pelayanan OPD berisikan pencapaian kinerja pada aspek pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan — temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang :

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu — isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Program dan Kegiatan berisikan uraian program, kegiatan dan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

BAB V PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam mencapai sasaran–sasaran yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menyusun anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melaksanakan sebanyak 11 program, 21 kegiatan, dan 49 sub kegiatan. Pada tahun 2024, anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar Rp 105.785.132.964 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 70.587.680.392 dengan persentase realisasi sebesar 66,73%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel II.1

TABEL II.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipasif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,68	63,69	100,01%	Tercapai
2.	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA	71%	80,12%	112,85%	Tercapai
		Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	17,5%	31,18%	178,17%	Tercapai
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga	28%	15,1%	53,93%	Belum Tercapai
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71-80)	B (65,75)	91,55%	Belum Tercapai

1. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah : Indikator Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 indikator yaitu :

- Indikator Kualitas Air (IKA) Yang di ukur berdasarkan parameter TSS, PH, BOD, COD, DO, Nitrat (sebagai N) dan Fecal Caliform.
- Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) di ukur berdasarkan luas tutupan lahan bervegetasi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil penggabungan analisis dari 3 indikator komponen lingkungan tersebut.

TABEL II.2
Kriteria dan Parameter IKLH periode 2020-2024

No	Kriteria	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Sungai	Derajat Keasaman (PH)	37,60%
		Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	
		Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	
		Oksigen Terlarut (DO)	
		Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	
		Total Phospat sebagai P (T-po ₄)	
		Padatan Tersuspensi Total (TSS)	
	Fecal Coliform		
2	Kualitas Udara	SO ₂	40,50%
		NO ₂	
3	Kualitas Lahan	Tutupan Vegetasi Hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman)	21,90%
		Tutupan Vegetasi Non Hutan (belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, RTH yang terdiri dari kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman kota, dan rehabilitasi hutan dan lahan (di APL)	

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atau 834 juta ton CO₂eq pada tahun 2030 dari kondisi Business As Usual (BAU). Berdasarkan Peraturan Presiden No 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon; diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada penurunan emisi GRK.

Dalam dokumen pembaruan NDC yang telah disampaikan pada UNFCCC pada Juli 2021 Indonesia berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi GRK sebanyak 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional.

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi GRK ini secara umum bertujuan untuk:

- # Mengetahui dan memantau tingkat emisi GRK emisi Gas Rumah Kaca (GRK) per sektor;
- # Merancang dan mengevaluasi kegiatan mitigasi perubahan iklim; # Menyusun laporan status emisi GRK Kota Medan;
- # Menyusun target pencapaian penurunan emisi GRK.

Pergub Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disebutkan bahwa target penurunan sebesar 24,8% dari BAU hingga tahun 2020. Target penurunan emisi GRK meliputi 5 sektor prioritas : pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi yang meliputi transportasi dan industri, serta pengolahan limbah.

TABEL II.3
Kondisi BAU dan target Penurunan GRK Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020

No	Sektor	Kondisi Emisi 2010 (tco2eq)	Baseline BAU 2020 (tCO2eq)	Mitigasi GRK (tCO2eq)	Perkiraan Penurunan GRK 2020 terhadap Total BAU (%)
1	Pertanian	9.324.598,5	11.727.942,2	5.183.979,0	2,0
2	Kehutanan dan lahan Gambut	139.132.277,0	187.871.098,0	31.027.594,7	12,2
3	Energi	8.383.000,0	22.098.000,0	5.316.000,0	2,5
4	Transportasi	5.299.200,0	10.861.300,0	4.540.000,0	1,8
5	Industri	7.659.900,0	16.266.210,0	12.037.000,0	4,7
6	Pengolahan Limbah	2.092.016,0	5.315.858,0	3.947.409,0	1,6
Total Emisi		163.507.991,5	254.140.408,2	63.081.982,7	24,8

Sumber : Pergub Prov. Sumatera Utara No. 36/2012

TABEL II.4
Emisi Gas Rumah Kaca 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup

Sektor	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ENERGI	1.165.687	1.239.152	1.317.604	1.401.400	1.490.923	1.586.587
Transportasi	1.688.160	1.873.858	2.079.982	2.308.780	2.562.746	2.844.648
IPPU	171.755	70.932	29.603	12.666	5.731	2.898
AFOLU	19.922	18.885	18.446	18.493	18.945	19.743
LIMBAH	340.160	372.317	407.861	447.256	491.057	539.935
TOTAL	3.385.684	3.575.144	3.853.496	4.188.595	4.569.402	4.993.810
		189.461	278.352	335.099	380.807	424.408
		0,055959324	0,077857566	0,086959743	0,090915119	0,092880451

TABEL II.5
Aksi Mitigasi Usulan dan Rencana

SEKTOR	2022	2023	2024	2025	2026
ENERGI	1.868	2.263	2.503	2.744	2.985
Transportasi	462.348	559.033	655.652	752.270	848.889
IPPU					
PERTANIAN	166	332	498	664	830
LAHAN	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397
LIMBAH	44.905	50.655	56.586	62.540	68.513
TOTAL	512.684	615.679	718.636	821.615	924.613
%	14,34%	15,98%	17,16%	17,98%	18,52%
	14,34%	1,64%	1,18%	0,82%	0,53%

3. Persentase Penanganan Persampahan yang Dikelola di TPA

Penanganan persampahan meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Persentase penanganan persampahan yang dikelola TPA merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana penanganan sampah di lingkungan masyarakat yang terangkut sampai dan dikelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan Bapak Walikota Medan Tahun 2024 penanganan sampah di Kota Medan ditargetkan sebesar 71%. Timbulan sampah tahun 2024 sebesar 632.149,41 ton. Sampah yang masuk ke TPA 506.479,11 ton sehingga $(506.479,11 \text{ ton}/632.149,41 \text{ ton}) \times 100\% = 80,12\%$. Target penanganan persampahan yang dikelola di TPA tahun 2025 adalah 72%.

4. Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari Tahun sebelumnya

WRS merupakan orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Pelayanan Kebersihan. Indikator ini menunjukkan adanya persentase peningkatan jumlah WRS pada daerah Wilayah Kota Medan. Pengelolaan WRS dilakukan dengan prinsip kolaborasi antara DLH dengan 21 kecamatan dengan melibatkan 151 Kelurahan se Kota Medan. Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pengelolaan persampahan dilimpahkan kepada 21 Kecamatan se Kota Medan dan pengutipan WRS dengan penetapan tarif retribusi sampah berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Target tahun 2024 kenaikan WRS sebesar 17,5 % terealisasi 31,5%. Total WRS Desember akhir 2023 sebanyak 102.063 WRS sedangkan akhir Desember 2024 sebanyak 133.886 WRS. Target kenaikan WRS tahun 2025 sebesar 18%.

5. Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga

Persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh

mana pengurangan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat/tingkat rumah tangga dalam kegiatan pengelolaan persampahan. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan pada lingkungan masyarakat. Jika merujuk pada Peraturan Walikota Medan Nomor 26 tahun 2019 tentang kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, ditetapkan bahwa tahun 2024 pengurangan sampah di Kota Medan ditargetkan sebesar 28%.

Pengurangan sampah 2024 selama 1 tahun sebesar 95.451,46 ton ($(95.451,46/632.149,41) \times 100\% = 15,10\%$) capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan (sumber : data sipsn 2024 periode 1). Kedepan perlu inovasi- inovasi yang ditingkatkan serta peningkatan peranan dari Bank Sampah, TPS / TPS- 3R, TPST, Rumah Kompos (Composting Center), kerjasama dengan tukang botot bahkan dari Rumah Tangga sendiri yang ada di lingkungan masyarakat serta sosialisasi-sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

Kedepan perlu inovasi- inovasi yang ditingkatkan serta peningkatan peranan dari Bank Sampah, TPS / TPS-3R, TPST, Rumah Kompos (Composting Center), kerjasama dengan tukang botot bahkan dari Rumah Tangga sendiri yang ada di lingkungan masyarakat serta sosialisasi-sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

Sampah Tidak Terkelola/Terdata

Ada sekitar 4,78% (30.218,84 ton) sampah tidak terdata dan terkelola diantaranya sampah dari rumah tangga untuk eko enzim, composting, magot, botot, penduduk perbatasan dengan Deli Serdang dimana memungkinkan sampah berpindah ke Kabupaten yang berbatasan dan dibuang ke tempat di luar TPS/TPA (sungai dll) serta pelaksanaan pendataan sampah yang dikelola di tingkat Rumah Tangga. Sampah dari rumah tangga diperkirakan karena dibakar dibuang ke tempat di luar TPS/TPA (sungai dll)

6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Tahun 2024 menjadi indikator baru dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan Bapak Walikota Medan. Target SAKIP tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah BB realisasi adalah B. Untuk nilai BB jika dikonversi ke nilai 71-80 untuk nilai SAKIP DLH tahun 2024 dengan nilai 65,75 sehingga target pencapaian $65,75/71=91,55\%$. Untuk tahun 2025 target SAKIPnya adalah BB.

TABEL II.6
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Tahun 2024 Periode I

No	KETERANGAN	NILAI	NILAI (Ton/hari)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	632.149,41	1.731,92
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)		
	<i>2,527,050 Jiwa x 0,7 kg x 365 hari</i>		
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	95.451,46	261,51
	Jumlah pemanfaatan kembali sampah	124,80	
	Jumlah pendauran ulang sampah	93,545,46	
	Persentase pengurangan sampah	15,10	
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	486.493,00	1.332,86
	Persentase penanganan sampah	75,35	

TABEL II.7.
Roadmap menuju Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan												
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
1.	Perencanaan lingkungan hidup melalui penyusunan RPPLH dan KLHS	Dokumen			-				-	-	↓	-	↓		
2a	Meningkatkan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan untuk pencegahan pencemaran	KM	-			-									
b	Mengurangi pencemaran air dan udara melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pemantauan dalam dokumen	-	↓	-					-	↓	-			-
3.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan melalui pengembangan TPS dan Pengembangan Teknologi di TPA	Jumlah TPA													-
4.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan penanggulangan pencemaran	Jumlah pencegahan dan	-	↓	-				-	-					

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan													
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC		
	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	pencemaran lingkungan														
5.	Penyelesaian pengaduan masyarakat dan penerapan sanksi dan penghentian sumber pencemaran di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan penerapan sanksi dan penghentian pencemaran			-	-	↓	-	-	↓	-	↓				-
6.	Meningkatkan tutupan lahan dengan peningkatan penanaman keanekaragaman hayati	Jumlah pohon yang ditanam				-	↓	-								

Roadmap Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Medan berfokus pada empat tahapan utama yang selaras dengan RPJMD dan Renja 2025 Dinas Lingkungan Hidup :

1. Perencanaan dan Penguatan Kebijakan : Penyusunan Perencanaan Lingkungan, Evaluasi kebijakan yang ada, Penyusunan peraturan baru terkait pengelolaan udara, air, sampah, dan RTH. Melibatkan masyarakat melalui edukasi dan kampanye lingkungan.
2. Implementasi Teknologi : Penggunaan teknologi untuk pemantauan kualitas udara dan air tanah secara real-time dengan peralatan AQMS.
3. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan : Pengembangan infrastruktur pengelolaan air, sampah, dan RTH, termasuk fasilitas pengolahan sampah terpadu serta pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk efisiensi dan keberlanjutan dan penanaman pohon ruang terbuka hijau.
4. Pengawasan dan Evaluasi : Sistem pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, evaluasi dampak kebijakan, dan pelaporan transparan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian target.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, teknologi, dan partisipasi masyarakat akan mempercepat pencapaian target peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan tujuan RPJMD dan Renja 2025 Dinas Lingkungan Hidup.

TABEL II.8.**Roadmap Menuju Peningkatan Cakupan Area Pelayanan Persampahan**

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan												
			J a n	F e b	M a r	A p r	M a y	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e c	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPS yang dioptimalisasi													<input type="checkbox"/>
4	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS - 3R/TPS yang ditingkatkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Roadmap untuk indikator peningkatan cakupan area pelayanan persampahan dengan indikator penanganan persampahan yang dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

a. Persiapan

Tujuan: Menyusun kerangka kerja untuk pengelolaan sampah yang efisien.

Identifikasi Sampah : Melakukan survei jenis dan volume sampah yang masuk ke TPA.

Penilaian Kapasitas TPA : Menilai kapasitas TPA dalam menerima sampah, termasuk kapasitas tampung dan daya dukung lingkungan.

Pengembangan Infrastruktur TPA/TPS : Memastikan TPA/TPS memiliki fasilitas yang memadai, seperti pemilahan, pengolahan, dan fasilitas pemantauan.

Indikator : Jumlah jenis sampah yang dikelola Ketersediaan fasilitas pemilahan dan pengolahan

b. Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di Sumbernya

Tujuan : Mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA dan meningkatkan kualitas sampah yang dikelola.

Edukasi dan Sosialisasi : Mengedukasi masyarakat dan pengelola sampah untuk melakukan pemilahan dari sumbernya (sampah organik, anorganik,

dan B3).

Infrastruktur Pemilahan : Menyediakan fasilitas pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan tempat usaha.

Indikator : Persentase sampah yang dipilah sebelum dibuang Jumlah masyarakat yang tereduksi tentang pemilahan sampah

c. Pengolahan Sampah di TPA

Tujuan : Mengolah sampah agar mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Komposting dan Daur Ulang : Menerapkan teknologi untuk pengolahan sampah organik melalui komposting dan mendaur ulang sampah anorganik.

Waste-to-Energy (WTE): Memanfaatkan sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi energi melalui pembakaran atau teknologi lainnya.

Indikator : Persentase sampah yang dapat diolah (kompos, daur ulang, WTE)

Volume sampah yang dikurangi melalui pengolahan

d. Pengelolaan Lindi dan Gas Metana

Tujuan : Mengurangi pencemaran lingkungan akibat lindi dan gas metana dari sampah.

Pengelolaan Lindi : Menyusun sistem pengelolaan lindi yang efektif, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Pengendalian Gas Metana : Memasang sistem pengendalian emisi gas metana, seperti sistem pengumpul gas dan pemanfaatan energi dari metana.

Indikator : Volume lindi yang dikelola dengan aman

Jumlah gas metana yang dikendalikan dan dimanfaatkan

e. Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan : Menilai efektivitas pengelolaan sampah dan mengevaluasi pencapaian tujuan.

Pemantauan Rutin : Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah di sekitar TPA.

Audit Sampah : Melakukan audit sampah secara berkala untuk menilai keberhasilan sistem pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir.

Indikator : Kualitas air, udara, dan tanah di sekitar TPA Tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah

f. Kolaborasi dengan Stakeholder

Tujuan : Meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam pengelolaan sampah.

Kerja Sama dengan Pemerintah dan Swasta : Menggalang kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

Keterlibatan Masyarakat : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan daur ulang.

Indikator : Jumlah kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah

g. Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Tujuan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Kampanye Pengurangan Sampah Nomor 2 s/d 4. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas TPA/TPS dan Teknologi

Tujuan: Mengimplementasikan teknologi terbaru dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola TPA.

Pelatihan SDM : Memberikan pelatihan bagi pengelola dan masyarakat terkait teknologi pengelolaan sampah terkini.

Adopsi Teknologi Baru : Mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang efisien dalam pengelolaan sampah di TPA.

Indikator : Jumlah pengelola yang terlatih Jumlah teknologi baru yang diterapkan di TPA.

**TABEL II.9
Roadmap Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga**

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan													
			J a n	F e b	M a r	A p r	M a y	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e c		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen														-
2.	Pengurangan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah														-
3.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat atau para pihak				↓		↓				-	↓		-	-

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memperoleh nilai sebesar 63,45 (enam puluh tiga koma empat lima) dengan predikat B (Baik) Nilai tersebut merupakan penjumlahan penilaian 4 (empat) komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut.

TABEL II.10
Road Map Peningkatan Nilai Sakip

No	Komponen/Subkomponen/Kriteria	Bobot Nilai	Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	63,45
Predikat Nilai Akuntabilitas Kerja			B

TABEL II. 11
Target Nilai SAKIP DLH tahun 2024 BB (72) yang menjadi Perjanjian Kadis Lingkungan hidup tahun 2025

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan													
			J a n	F e b	M a r	A p r	M a y	J u n	J u l	A g u	S e p	O k t	N o v	D e c		
1	Meninjau kembali sasaran dan indikator sasaran pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 untuk diselaraskan dan dilakukan perbaikan;	Dokumen														
2	Membuat surat Kepala Perangkat Daerah perihal Perintah Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja/Jadwal Monev kepada Sub Unit (1 Level dibawah Kepala PD) dengan melampirkan Form isian kepada Bagian/Bidang terkait;	Dokumen														
3	Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional yang dipertimbangkan oleh tim penilai kinerja dalam bentuk evaluasi/nota dinas/surat dinas promosi/ mutasi pegawai;	Dokumen														
4.	Membuat dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);	Dokumen														
5	Setiap unit kerja/bidang membuat laporan pengukuran kinerja triwulan yang meliputi target, realisasi, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK), kemudian dilakukan rekapitulasi pada saat Monev;	Laporan														
6	Memfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan mencantumkan dalam LkjIP.	Laporan														

2.1.1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tabel TC.29

Evaluasi capaian kinerja dilakukan mulai dari tingkat program sampai dengan tingkat kegiatan pada setiap program (kinerja kegiatan). Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan hasil penyempurnaan program/kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam Renstra.

TABEL II. 12 (TC. 29)
Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) OPD
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	100 %	70 %	80 %	80 %	100%	80 %	83,33 %	83,33 %
Rencanan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	17 Dokumen	5 Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	11 Dok	64,71 %
PENYUSUNAN RPPLH KAB/ KOTA	Jumlah dokumen RPPLH di kab/kota yg berisi arahan/muat an RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	17 Dokumen	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dok	17,65 %
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPLH KAB/KOTA	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen terkait lainnya yang tersedia	21 Dokumen	4	0	0	0%	0	4 Dok	19,05 %
	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	18 Dokumen	5 Dok	0	0	0%	0	5 Dok	27,78 %
Penyelenggaraan Kajian LH Strategis (KLHS) Kab/Kota	Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	6 Dokumen	1 Dok	0	0	0%	0	9 Dok	150 %
	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	9 Dokumen	1 Dok	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dok	133,33 %
PEMBUATAN & PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	6 Dokumen	1 Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dok	50 %
PEMBUATAN & PELAKSANAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang tersedia	6 Dokumen	0	0	0	0%	0	1 Dok	16,67 %
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	31,61 Indeks	28 Nilai	30,27 Indeks	30,27 Indeks	100%	30,27 Indeks	30,27 Indeks	95,76 %
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik	10 Hektar	2 Ha	5 H	5 Hektar	100%	5 Hektar	7 H	70 %

Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Ha	3 Ha	5 Hektar	5 Hektar	100%	5 Hektar	8 Hektar	66,67 %
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN & SDM DLM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	200 Orang	50 Orang	0 Orang	0	0%	100 Orang	150 Orang	75 %
PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100 %
	Jumlah Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	10 Ha	0	0	0	0%	0	0	0,00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Volume Sampah yang ditangani	2,651,858,737 Ton	100%	468250,4 Ton	359314,158 Ton	77%	468,250.36 Ton	468,250.36Ton	0.02 %
	Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	75 %	100 %	0	0	0%	0	65 %	86,67 %
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kab/ Kota	Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	60 %	0	65 %	55 %	85%	65 %	65 %	108,33 %
SUPERVISI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN TPA/ TPST/SPA/ TPS- 3R/ TPS KEWENANGAN KAB/KOTA	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia	13 Dokumen	0	0	0	0%	0	9 Dokumen	69,23 %
	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/SPST/SPA/TPS-3R/ TPS	13 Dokumen	1 Dok	0	0	0%	0	1 Dok	7,69 %
PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIK SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	36 Dokumen	0	9 Dokumen	5 Dokumen	56%	9 Dokumen	9 Dokumen	25 %
PEMBANGUNAN TPA/TPST/ SPA /TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang dibangun	743 Ton/ Hari	0	1259 Ton/Hari	984,39 Ton/Hari	78%	1,259 Ton/ Hari	1259 Ton/ H	169,45 %
	Jumlah SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	49 Unit	0	0	0	0%	0	1 Unit	2,04 %
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	300,000 RT	83.530 RT	0	0	0%	0	83530 RT	27,84 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
OPTIMALISASI TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	3 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	33,33 %
PENINGKATAN PA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	3992 Ton/ Hari	0	1259 Ton/Hari	984,39 Ton/Hari	78%	1,259 Ton/Hari	1259 Ton/H	31,54 %
	Jumlah SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan fasilitas, sarana dan prasarannya	6 Unit	0	0	0	0%	0	2 Unit	33,33 %
REHABILITASI TPA/TPST/SPA/ TPS -3R/TPS	JumlahTPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	0	0	0%	0	11 Unit	110 %
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang terkelola	74 %	100 %	72 %	65 %	90%	65 %	65 %	87,84 %
	Persentase Kebijakan/Regulasi/Strategi Pengelolaan Persampahan yang Tersedia	74 %	100 %	0	0	0%	65 %	65 %	87,84 %
Pengelolaan Sampah	Timbulan sampah yang terkelola	70 %		72 %	65 %	90%	45 %	45 %	64,29 %
	Jumlah Kebijakan yang disusun dalam mendukung pelaksanaan kerjasama Daerah	5 Dokumen	0	0	0	0%	0	1 Dok	20 %
PENYUSUNAN KEBIJAKAN & STRATEGI DAERAH PENGELO LA SAMPAH KAB/KOTA	Jumlah Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang tersedia	5 Dokumen	0	0	0	0%	0	1 Dok	20 %
PENINGKATANPERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGE LOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	258 Kelompok	3 Kelompok	85 Kelompok	45 Kelompok	53%	85 Kelompok	88 Kelompok	34,11 %
	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	195 Kali	0	0	0	0%	0	12 Kali	6,15 %
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kab/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33 %
	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan	52291	0	0	0	0%	0	2543 Unit	4,86 %

Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	persampahan yang tersedia	Unit							
PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN & PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH & FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3,544,830 Ton	0	547.000 Ton	467.072 Ton	85%	547,000 Ton	547000 Ton	15,43 %
PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KAB/KOTA	Volume Sampah yang terangkut dan diproses di TPA	4025000 Ton	0	0	0	0%	0	335811.84 Ton	8,34 %
	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	675,000 Ton	543.952 Ton	0	0	0%	0	543952 Ton	80,59 %
PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	3 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	33,33 %
PENGURANGAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMBATAAN, PENDAURAN ULANG DAN PEMANFAATAN KEMBALI	Jumlah Fasilitas Pengurangan Sampah yang terbangun/tersedia	33 Unit	0	0	0	0%	0	3 Unit	9,09 %
	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	5 Laporan	1 Laprn	0	0	0%	0	1 Laprn	20 %
PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KAB/KOTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang tersedia	434 Unit	0	0	0	0%	0	1 Unit	0,23 %
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	70%	80 %	80 %	100%	80 %	80 %	80 %
	Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 %	70%	0	0	0%	0	70 %	70 %

Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyimp Sementara Limbah B3	Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	100 %	0	50 %	50 %	100%	50 %	50 %	50 %
	Cakupan Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	75 %	30 %	0	0	0%	0	50 %	66,67 %
FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	8 %
	Jumlah Laporan Rincian Teknik penyimpanan dan Pengumpulan Skala LB3 di Kota Medan	80 Laporan	0	0	0	0%	0	21 Lap	26,25 %
VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3	250 Sampel	0	0	0	0%	0	10 Sampel	4 %
	Jumlah Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara & Pengumpulan Limbah B3	13 Laporan	1 Laporan	0	0	0%	0	1 Lap	7,69 %
PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN THDP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	100 %	70 %	80 %	80 %	100%	80 %	73,33 %	73,33 %
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemda KabKota	Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	100 %	70 %	80 %	80 %	100%	80 %	73,33 %	73,33 %
FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN & KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	732 Dokumen	143 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	100 Dokumen	243 Dokumen	33,20 %
	Jumlah Verifikasi Persetujuan Teknis SLO (Surat Kelayakan Operasional)	500 SLO	0	0	0	0%	0	41 SLO	8,20 %
	Jumlah Persetujuan Lingkungan Hidup yang diterbitkan	1262 Dokumen	0	0	0	0%	0	132 Dok	10,46 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMDA, PROVINSI & PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	600 Badan Usaha	0	200 Badan Usaha	217 Badan Usaha	109%	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	33,33 %
PENGAWASAN USAHA DAN /ATAU KEGIATAN YANG IZIN LH, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/ KOTA	Jumlah Usaha/ Kegiatan yang diawasi oleh Pemerintahan Kota	1,200 Pelaku Usaha	0	0	0	0%	0	200 Pelaku Usaha	16,67 %
	Jlh Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yg diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemda Kab/ Kota	1,200 Laporan	224 Laporan	0	0	0%	0	224 Laporan	18,67 %
KOORDINASI & SINKRONISASI PENGAWASAN & PENERAPAN SANKSI UPAYA & RENCANA PPLH	Jumlah Sanksi yang diterbitkan dalam Rangka Pengawasan dan Penerapan Upaya dan Rencana PPLH	125 Sanksi	0	0	0	0%	0	18 Sanksi	14,40 %
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	125 Dokumen	45 Dok	0	0	0%	0	45 Dok	36 %
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	96 %	100 %	100 %	100%	100 %	99,67 %	99,67 %
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan & Pengelolaan LH (PPLH) Kab/Kota	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	1 %	1 %
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)	100 %	99 %	0	0	0%	0	99,5 %	99,50 %
PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KAB/KOTA	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	246 Pengaduan	0	50 Pengaduan	98 Pengaduan	196%	50 Pengaduan	50 Pengaduan	20,33 %

Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup yang ditangani	300 Pengaduan	0	0	0	0%	0	25 Peng	8,33 %
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KAB/KOTA	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	300 Dokumen	48 Dokumen	0	0	0%	0	48 Dokumen	16 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100 %	25,10%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	25,4 %	25,1 %	0	0	0%	0	25,07 %	98,70 %
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH yang Tersedia	29 Dokumen	2 Lap	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	8 Dokumen	12 Dok	41,38 %
KOORDINASI, SINKRONISASI, & PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, & LAUT	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	39 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	75%	8 Dokumen	17 Dokumen	43,59 %
	Jumlah Dokumen lap pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran LH terhadap Media Tanah, Air,Udara, & TPA yg tersedia	32 Laporan	0	0	0	0%	0	6 Lap	18,75 %
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGEN DALIAN EMISI GRK, MITIGASI & ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	18 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	38,89 %
	Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia	5 Laporan	0	0	0	0%	0	1 Lap	20 %
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi yang tersedia	5 Laporan	0	0	0	0%	0	1 Lap	20 %
	Jumlah laporan kegiatan kampung iklim sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terlaksana	5 Laporan	0	0	0	0%	0	1 Lap	20 %
PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	14 Dokumen	4	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	2 Dokumen	2 Dok	14,29 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah prasarana dan sarana laboratorium lingkungan hidup yang tersedia dan terkelola dengan baik dan memadai	8 Unit	0	0	0	0%	0	2 Unit	25 %
	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	8 Dokumen	4 Dok	0	0	0%	0	4 Dok	50 %
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	100 %	100%	80 %	60 %	75%	80 %	80,6 %	80,60 %
	Cakupan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang ditanggulangi	75 %	30 %	0	0	0%	0	65,15 %	86,87 %
PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kab/Kota yang Dilaksanakan	36 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	0	0%	2 Laporan	5 Laporan	13,89 %
	Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH pd masyarakat yang dilaksanakan	16 Kegiatan	3 Lap	0	0	0%	0	3 Keg	18,75 %
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	75 %	100%	40 %	40 %	100%	40 %	40,6 %	54,13 %
	Cakupan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang dipulihkan	75 %	40 %	0	0	0%	0	70 %	93,33 %
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN	Jlh Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi &/atau Sek tor lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yg Dilaksanakan	141 Dokumen	1 Dok	20 Dokumen	45 Dokumen	225%	20 Dokumen	21 Dok	14,89 %
	Jumlah pencemaran yg berhasil dihentikan dari sumbernya	755 Kasus	0	0	0	0 %	0	132,3 K	17,52 %
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	90 %	95 %	95 %	100 %	95 %	91,67 %	91,67 %

Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50 %
PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	1 Dok	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	5 Dokumen	6 Dokumen	30 %
	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup yang difasilitasi	26 Kali	0	0	0	0 %	0	3 Kali	11,54 %
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN & KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	9005 Orang	2.250 orang	1500 Orang	1500 Orang	100 %	1500 Orang	3750 Orang	41,64 %
	Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terselenggara	15 Kali	0	0	0	0 %	0	5 Kali	33,33 %
PENINGKATAN KAPASITAS & KOMPETENSII SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/ Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 Lembaga	5 Lembaga	0	0	0 %	0	5 Lbg	33,33 %
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup	100 %	70 %	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	80 %
	Capaian Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup	100 %	70 %	0	0	0 %	0	85 %	85 %
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	21 Kegiatan	4 kali	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	10 Kegiat	47,62 %
PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/ LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1960 Entitas	400 Entitas	750 Entitas	840 Entitas	112 %	750 Entitas	1150 Entitas	58,67 %
	Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terselenggara	1300 Lembaga	0	0	0	0 %	0	260 Lembaga	20 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	100 %	0 %	0	0 %	0 %	100 %	100 %
Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg disusun tepat waktu	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	12 Dokumen	2 Dok	0	0	0 %	0	4 Dok	33,33 %
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1 Dok	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	6 Dok	50 %
	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	1 %	1 %
KOORDINASI & PENYUSUNAN LAP CAPAIAN KINERJA & IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	6 Dokumen	0	0	0	0 %	0	1 Dokumen	16,67 %
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0 %	0	1 Dokumen	16,67 %
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1 Dok	0	0	0 %	0	1 Lap	16,67 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100 %	100 %	0	0	0%	0 %	100 %	100 %
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Org/ Bulan	124 Org/bulan	135 Org/Bulan	135 Org/Bulan	100%	135 Org/Bulan	135 Org/Bulan	100 %
	Jumlah Pegawai ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	421 Orang	0	0	0	0%	0	71 Org	16,86 %

Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPANGAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir takhuan yang tersedia	6 Dok	0	0	0	0%	0	1 Dok	16,67 %
	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1 Lap	0	0	0%	0	1 Lap	16,67 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	100 %	100 %	0	0	0%	100 %	100 %	100 %
PENINGKATAN SARANA & PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	Jumlah ASN dan pegawai lainnya di perangkat daerah yang diberikan pakaian khusus hari - hari tertentu	790 Stel	0	0	0	0%	0	144 Stel	18,23 %
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	0	0	0	0%	2 Paket	2 Paket	22,22 %
	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	929 Stel	0	0	0	0%	0	164 Stel	17,65 %
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	135 Orang	0	0	0	0%	0	0 Orang	0,00 %
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemenasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang	20 Orang	0	0	0%	20 Orang	50 Orang	37,04 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50 %
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jlh tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 %	0	0	0	0%	0	100 %	100 %
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg Disediakan	12 Paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	25 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	685 Unit	0	0	0	0%	0	100 Unit	14,60 %
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	25 %
	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	0	0	0	0%	0	100 %	100 %
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	10 Paket	50 %
	Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	100 %	0	0	0	0%	0	100 %	1,00 %
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN & PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	7 Paket	35 %
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	0	0	0	0%	0	100 %	100 %
PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	6 Pkt	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	13 Pkt	54,17 %
	Jumlah jasa penyelenggaraan peringatan hari raya/h.besar/acara ttentu	23 Kegiatan	0	0	0	0%	0	3 Keg	13,04 %
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	190 Lap	40 Lap	45 Lap	45 Lap	100%	45 Laporan	85 Lap	44,47 %
	Jumlah tamu yang difasilitasi	130 Orang	0	0	0	0%	0	300 Org	230,77 %
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat oordinasi & Konsultasi SKPD	600 Laporan	150 Lap	150 Lap	150 Lap	100%	15 Lap	300 Lap	50 %
	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konultasi yang tersedia	500 Kali	0	0	0	0%	0	20 Kali	4 %
	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD yg diselenggarakan	335 Kali	0	0	0	0%	0	100 Kali	29,85 %
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang diikuti	360 Kali	0	0	0	0%	0	64 Kali	17,78 %
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	5 Laporan	0	0	0	0%	0	1 Lap	20 %
DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PD SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dikelola dengan baik	24 Aplikasi	0	0	0	0%	0	4 Aplik	16,67 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	7 Kegiatan	1 Kegiat	0	0	0%	0	2 Kegiatan	28,57 %
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAP.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	656 Unit	0	97 Unit	1 Unit	1%	97 Unit	97 Unit	14,79 %
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg tersedia	250 Unit	0	0	0	0%	0	196 Unit	78,40 %
PENGADAAN ALAT BESAR	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	0	0	0	0%	0	0 Unit	0,00 %
	Jumlah Alat Besar/ Alat Kendaraan Berat yang tersedia	10 Unit	0	0	0	0%	0	2 Unit	20 %
PENGADAAN MEBEL	Jumlah Mebel Kantor yang Tersedia	70 Unit	0	0	0	0%	0	2 Unit	2,86 %
PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	103 Unit	4 Unit	56 Unit	56 Unit	100%	56 Unit	60 Unit	58,25 %
	Survei kepuasan internal	0	0	83 %	82,82 %	100%	0	0	0
	jenis & jlh sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	200 Unit/Jenis	0	0	0	0%	0	100 Unit/J	50 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemda yg tersedia	100 %	100 %	0 %	0	0%	0 %	100 %	100 %
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Lap	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Lap	50 %
	Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	10800 Surat	0	0	0	0%	0	1010 Srt	9,35 %

Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR & LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Lap	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	4 Lap	33,33 %
	Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	30 Rekening	0	0	0	0%	0	5 Rek	16,67 %
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	13 Lap	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	26 Lap	50 %
	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	60 Orang	0	0	0	0%	0	10 Org	16,67 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 %	0	100 %	95 %	95%	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	7 Kegiatan	1 Kegiat	0	0	0%	0	2 Kegiat	28,57 %
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, & PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	0	0	0	0%	6 Unit	6 Unit	25 %
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	28 Unit	0	0	0	0%	0	5 Unit	17,86 %
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK & PERIZINAN KENDARAAN DINAS OP/LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345 Unit	51 Unit	76 Unit	25 Unit	33%	76 Unit	127 Unit	36,81 %
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2889 Kegiatan	0	0	0	0%	0	3 Keg	0,10 %
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	637 Unit	120 Unit	71 Unit	71 Unit	100%	71 Unit	291 Unit	45,68 %
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR & BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	8 Unit	50 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Tahun berjalan 2025 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA & PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	115 Unit	5 Unit	77 Unit	77 Unit	100%	77 Unit	82 Unit	71,30 %
	Jenis & jlh sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 Unit/ Jenis	0	0	0	0%	0	100 Unit/J	100 %
Penataan Organisasi	Persentase Cakupan Penataan Organisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200 Dokumen	40 Dok	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	40 Dokumen	80 Dok	40 %
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Kali	0	0	0	0%	0	40 Kali	80 %

2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra OPD

Evaluasi Capaian Renstra OPD dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian sasaran Renstra Perubahan pada tahun 2024 terhadap target yang direncanakan yang secara singkat dapat dijelaskan bahwa evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran dilakukan dengan melakukan analisis terhadap masing- masing Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing- masing sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah/Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Dinas Lingkungan Hidup tidak termasuk OPD yang memiliki SPM sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Tabel II.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan paling tinggi adalah pada Program Pengelolaan Persampahan dan terendah pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lihat Tabel II.9

TABEL II.13 (TC.30)

Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja awal RENSTRA	TARGET				REALISASI				TARGET		Kondisi Kinerja akhir RENSTRA
				2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,6	61	60,02	61,89	63,68	62,39	61,89	63,67	63,69	63,7	63, 71	63,71%
2.	Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah	72%	72,88 %	72,81 %	73%	71%	89,71 %	49,34 %	71,19	80,12 %	72%	70%	70%
		Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	-	-	-	15%	17,5%	-	-	16,33 %	31,18 %	18%	18%	18%
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan sampah	10%	10,14 %	9,62%	27%	28%	3,04%	5,16%	13,01 %	15,1%	28%	30%	30%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	BB	-	-	-	B	BB	A	A

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan kualitas air sungai serta peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim (emisi gas rumah kaca) dan kondisi persampahan termasuk TPA dan TPS.

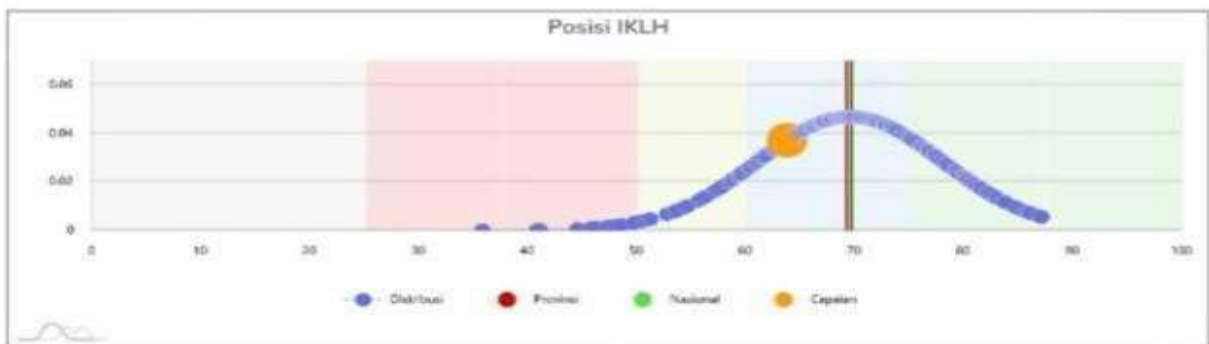
Kepala Daerah : Muhammad Bobby Aff Nasution, SE, M.M
 Luas Wilayah : 281990 Km²
 Populasi : - JIWA

Kepala DPRD : Hasyim, SE
 Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL
 Pendapatan Per Kapita : -

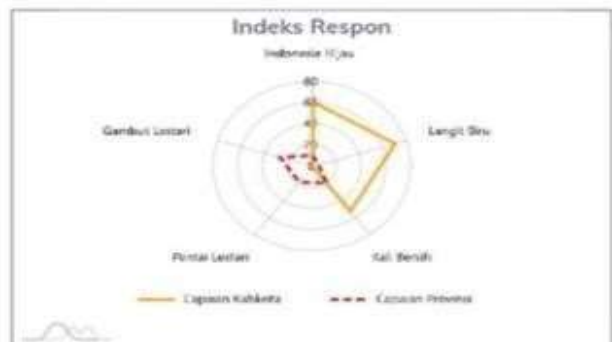
IKLH
63.69
 SEDANG

Indeks Respon
47.80

Peringkat
 Nasional : 356 dari 514 Kabupaten/Kota
 Provinsi : 27 dari 33 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	11	8	8
AIR	29	146	144
LAHAN	0	1	1
TOTAL	40	155	153



SKOR	KRITERIA
80 ≤ x < 100	SANGAT BAIK
70 ≤ x < 80	BAIK
60 ≤ x < 70	SEDANG
50 ≤ x < 60	KURANG
0 ≤ x < 50	SANGAT KURANG

GAMBAR II.1

Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 (Air, Udara dan Lahan)

Terkait isu persampahan Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum tahun 2029, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dimana Presiden telah memberikan arahan tegas untuk mempercepat penanganan sampah melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah. Menindaklanjuti arahan dimaksud Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan persampahan akan dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif

dari hulu hingga hilir. Adapun Strategi Pemerintah Kota Medan mencakup pendekatan hulu seperti penguatan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pendekatan hilir melalui penerapan teknologi *Waste-to- Energy* (WTE). Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi tersebut diharapkan tak hanya mampu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan mendorong pengaplikasian ekonomi sirkular.

Jumlah Penduduk yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan produksi sampah dan dengan laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2024, sebanyak 274 kabupaten/kota melaporkan total timbulan sampah mencapai 27,74 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton telah terkelola dengan baik, sedangkan 34,29% atau sekitar 7,2 juta ton masih belum terkelola secara optimal.

Kota Medan Berdasarkan data BPS Kota Medan hasil sensus penduduk tahun 2010 dan 2020, jumlah penduduk Kota Medan telah bertambah sebesar 337.642 jiwa. Artinya jika dirata-ratakan jumlah penduduk tersebut meningkat pertahunnya sebesar 33.764 jiwa/tahun. Jika dibandingkan dengan standar timbulan sampah rumah tangga yang terdapat pada SNI 8632:2018 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, standar timbulan sampah rumah tangga untuk kota metropolitan adalah 0,65-0,70 kg/orang/hari atau 2,14-2,32 liter/orang/hari dengan jumlah penduduk tahun 2023 yaitu sebesar 2.474.166 jiwa, maka timbulan sampah maksimal yang dihasilkan adalah 1.731,90 ton dalam sehari.

TABEL II.14
Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025 - 2029

Tahun	Proyeksi Timbulan Sampah Harian Kota Besar : 3 L/Orang/ hari (L/hari)	Proyeksi Timbulan Sampah Tahunan (m ³ / Tahun)
2025	7.494.879	2.735.631
2026	7.530.441	2.748.611
2027	7.565.562	2.761.430
2028	7.600.167	2.774.061
2029	7.634.418	2.786.563

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029

Selain terus meningkatnya timbulan sampah di Kota Medan, persoalan lain terkait risiko lingkungan akibat persampahan adalah masih adanya sebagian penduduk Kota Medan dalam mengatasi tumpukan sampah di lingkungan rumah menggunakan cara membuang sampah ke sungai dan membakar. Membuang sampah ke sungai dan membakar justru akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Pembakaran sampah akan menghasilkan gas CO yang merupakan *silent killer*, di mana ketika CO terhirup oleh manusia, CO akan mengikat Hb pada darah sehingga membentuk COHb yang sangat berbahaya bagi manusia dan berdampak kematian, sedangkan pembuangan sampah ke sungai dapat menimbulkan masalah pencemaran air sungai, dan penumpukan sampah juga akan menyebabkan pencemaran air tanah, hal ini diketahui dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dimana telah dilakukan uji laboratorium pada 9 (sembilan) sungai di Kota Medan dan seluruh sungai yang ada menunjukkan parameter cadmium yang melebihi baku mutu yang ditetapkan dan salah satu penyebab tingginya kadar cadmium berasal dari endapan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan, tata kelola yang berbasis data dan inovasi, serta pemberdayaan masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Berikut adalah peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2026- 2029.

Gambaran Umum TPA Kota Medan

- Lokasi :
Berada di **Kecamatan Medan Marelan Kelurahan Terjun.**
- Mulai dioperasikan pada **07 Januari 1993**
- Memiliki luas : **13.7 Ha**
 - Zona Aktif : **7,80 Ha**
 - Zona Tidak Aktif/ Taman TPA Terjun : **2,20 Ha**
 - Zona Pengembangan/Sanitary Landfill : **3,70 Ha**
- Persentase pemakaian lahan \pm 90%
- Sampah yang terangkut ke TPA sebanyak : **\pm 1,800 Ton/Hari**
- Jumlah kendaraan pengangkut sampah:
 - Truk sampah (Typer, Convektor, Armroll) sebanyak **292 unit**
 - Becak Bermotor Pengangkut sampah sebanyak **992 unit**
- Jumlah alat berat (Bulldozer, Excavator, Telescopic Handler, Bachoeloder) yang beroperasi sebanyak **17 unit**
- Jumlah pemulung yang ada di TPA sebanyak **\pm 350 orang**

A. Tantangan Pengelolaan Lingkungan Di Kota Medan

TABEL II.15
Tantangan Pengelolaan Lingkungan Di Kota Medan

Aspek	Kondisi Saat Ini (2021–2024)	Tantangan yang Dihadapi
1. Data dan Informasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan kualitas udar (AQMS) sudah dilakukan di 4 (empat) titik mewakili Kawasan Perindustrian, Permukiman, Perkantoran dan Pusat Kota - Data tutupan pohon tersedia melalui kerja sama dengan WRI (2023). 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasi dengan sistem Medan Satu Data. - Kurangnya sistem digital berbasis spasial. - Kondisi udara AQMS rata-rata dalam kategori <i>sedang</i> sehingga diperlukan usaha guna mempertahankan kondisi tersebut bahkan meningkatkan kondisi menjadi <i>baik</i>. - Tidak tersedia jumlah keseluruhan Usaha/ Kegiatan yang ada di Kota Medan - Minimnya vegetasi pada area publik maupun private - Cakupan digitalisasi data baru $\pm 40\%$.
2. Pengelolaan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Timbulan sampah ± 1.800 ton/hari (0,7 kg/kapita) - 25 bank sampah, 3 TPS3R, dan 7 usaha pengolahan sampah diluar Bank Sampah dan TPS 3R - Masterplan Management Persampahan disusun (2023) - Laporan Pemantauan TPA Terjun 2023 dan 2024 - Laporan Pemantauan Sungai 2023 dan 2024 - Laporan Pemantauan Danau 2023 dan 2024 - Laporan Pemantauan Roadside 2023 dan 2024 - Laporan Pemantauan Air Limbah 2023 dan 2024 - Laporan Pemantauan Emisi 2023 dan 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilahan sampah rumah tangga sampai dengan Tahun 2024 masih rendah ($\pm 15\%$) - Cakupan pelayanan pengangkutan sampah mencapai $\pm 80\%$ wilayah perkotaan. - Masih terdapat 5% sampah tidak terkelola sampai dengan Tahun 2024 - Realisasi volume terangkut ± 1.100 ton/hari. - Partisipasi masyarakat belum merata akibat rendahnya pemahaman masyarakat dalam pemilahan sampah - Lahan untuk pengolahan persampahan dengan penerapan teknologi <i>Waste to Energy (WTE)</i> - Lahan perluasan TPA Terjun ± 6 Ha agar dapat dilakukan penutupan TPA Terjun secara berkelanjutan dengan teknologi Ekstraksi Gas <i>Sanitary Landfill</i> dengan lapisan membran dasar dilengkapi fasilitas lindi dan pipa ventilasi gas - Pembiayaan infrastruktur WTE diantaranya perpipaan gas, incinerator dan proses pengolahan sampah (membusuk pada wilayah TPA Terjun dan tidak membusuk/terpilah pada lokasi lahan WTE)
3. Kapasitas SDM dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi DLH sudah mencakup 4 bidang dan 1 UPT Laboratorium Lingkungan. - Sudah ada 12 ASN tersertifikasi kompetensi pengawasa lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan tenaga analis laboratorium, ahli iklim, dan GIS masih belum terpenuhi secara optimal.
4. Infrastruktur dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 1 laboratorium lingkungan. - Sistem pemantauan kualitas udara realtime dan terkoneksi dengan system ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup - Tersedia TPA Terjun dengan luas 3,7 Ha dengan metode <i>sanitary landfill</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratorium lingkungan yang tersedia belum memenuhi standarisasi serta tidak teregister dan terakreditasi di KLH - Pengelolaan dan manajemen TPA belum memenuhi standar lingkungan - Belum tersedianya pengelolaan persampahan (TPS 3R, TPST) di hulu - Tidak optimalnya pengelolaan TPA dengan metode <i>sanitary landfill</i> - Terbatasnya armada persampahan yang diperkirakan hanya mampu melayani ± 300.000 KK dari total ± 550.000 KK di Kota Medan (ritase pengangkutan 2x sehari sesuai Perwal No.79 Tahun 2023) - Keterbatasan lahan pengelolaan sampah baik di hulu maupun di hilir

Aspek	Kondisi Saat Ini (2021–2024)	Tantangan yang Dihadapi
5. Perubahan Iklim dan Ketahanan Ekologis	<ul style="list-style-type: none"> - RAD-GRK dan RAD-API Kota Medan telah disusun - Terdaftar dalam Global Covenant of Mayors (GCoM). - Medan menjadi pilot city Urban Act oleh GIZ, UNESCAP, dan UCLG ASPAC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya integrasi kebijakan iklim dalam pembangunan fisik dan RPJMD. - Rendahnya pemahaman lintas OPD.
6. Kolaborasi dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Total nilai CSR lingkungan ±USD 5 juta (2022–2024) - Kolaborasi aktif dengan GIZ, WRI, IGES, dan KLHK - Kolaborasi dengan Penggiat Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya mekanisme pembiayaan inovatif seperti <i>green bonds</i> dan <i>blended finance</i>. - Koordinasi lintas OPD dan swasta belum terstruktur. - Anggaran dan kebijakan pengelolaan sampah belum mencapai 3% dari APBD sebagaimana arahan Surat Kementerian Lingkungan Hidup No. s.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 - Rendahnya kesadaran Pelaku Usaha dalam menyampaikan CSR khususnya pada sektor lingkungan

B. Perencanaan Pembangunan Kota Medan

Kota Medan telah memiliki berbagai produk perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan pokok dalam ketersediaan rencana pembangunan kota ini adalah tingkat sinkronisasi dan keterpaduannya secara hirarkis, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan kota, yang relatif masih lemah sehingga secara implementatif belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Berbagai permasalahan pokok dalam penyelenggaraan produk-produk perencanaan pembangunan kota antara lain adalah :

- Masih terbatasnya sumber daya pembangunan yang dapat dikelola dalam pembangunan kota;
- Masih relative rendahnya koordinasi, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan kota;
- Terbatasnya dukungan kerangka studi, instrument analisis dan studi lapangan yang dilakukan sebelum menyusun rencana pembangunan kota. Masih terbatasnya wadah dan sarana partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan kota;
- Masih terbatasnya kegiatan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut evaluasi rencana pembangunan kota. Implementasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang relatif belum sepenuhnya optimal;
- Masih terbatasnya pendidikan dan latihan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perencana.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/pelaku usaha untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2. Kajian/studi-studi di bidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Medan dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Koordinasi dan dinamika perubahan. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan mutu kualitas lingkungan. Untuk Sumber Daya Manusia Aparatur dapat melakukan yaitu :
 - a. Mengikuti pendidikan fungsional, kursus dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
 - b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan TUPOKSI dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
 - c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan TUPOKSI dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana dapat melakukan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Teknologi Informatika serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap serta optimasi pemeliharaan;
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

TABEL II.16
Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
1	2.11.0 00001	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	NA	NA	NA	NA		T
2	2.11.0 00004	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota	56,03	61,89	63,67	63,69		T
3	2.11.0 00005	Data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu			9	16		T
4	2.11.0 00006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.			Validasi di Propinsi	1		T
5	2.11.0 00007	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah			Validasi di Propinsi	1		T
6	2.11.0 00009	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota			Validasi di propinsi	1		T
7	2.11.0 00012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya			Proses	1		T
8	2.11.0 00013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK			Proses	1		T
9	2.11.0 00018	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota		1	1	1		T
10	2.11.0 00019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB		1	1	1		T
11	2.11.0 00020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya		NA	NA	1		T
12	2.11.0 00021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	3	5	5	5		T
13	2.11.0 00022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB			1	1		T
14	2.11.0 00024	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup	1	1	1	1		T
15	2.11.0 00026	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku	18	6	12	4		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
16	2.11.0 00028	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1	1	1	1		T
17	2.11.0 00029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	4	7	7	7		T
18	2.11.0 00030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.	1	1	1	1		T
19	2.11.0 00033	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun	1	1	1	1		T
20	2.11.0 00034	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	1	1	1	1		T
21	2.11.0 00037	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST	1	1	1	1		T
22	2.11.0 00039	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	1	1		T
23	2.11.0 00041	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan di Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	-	-	1	1		T
24	2.11.0 00043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	1	1	1	1		T
25	2.11.0 00044	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	77	6	20	21		T
26	2.11.0 00046	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan	28	29	31	31		T
27	2.11.0 00048	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	12	25	48	99		T
28	2.11.0 00049	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	60	49	61	31		T
29	2.11.0 00051	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan.	163	205	171	217		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
30	2.11.0 00052	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	367	12	34	40		T
31	2.11.0 00056	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	367	12	34	40		T
32	2.11.0 00058	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan	367	12	34	40		T
33	2.11.0 00060	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Izin/ persetujuan	Data dan jumlah usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah	-	-	-	29		T
34	2.11.0 00062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	1	1	1	1		T
35	2.11.0 00063	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	-	-	-	-		T
36	2.11.0 00066	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Kegiatan	1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah	1	1	1	1		T
37	2.11.0 00067	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1	1	1	1		T
38	2.11.0 00068	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada oftaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali	1	1	1	1		T
39	2.11.0 00069	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas	29	29	31	31		T
40	2.11.0 00070	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya	21	28	28	45		T
41	2.11.0 00071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	0	0	45	45		T
42	2.11.0 00076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	1	1	1	1		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
43	2.11.0 00078	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	-	38	34	31		T
44	2.11.0 00080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi maupun aktivitas remediasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	-	-	1	1		T
45	2.11.0 00081	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-	82	1	45		T
46	2.11.0 00083	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	-	-	1	1		T
47	2.11.0 00084	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	1	1	1	1		T
48	2.11.0 00086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan	-	1	1	1		T
49	2.11.0 00098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	3	3	6		T
50	2.11.0 00099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	-	1	1	1		T
51	2.11.0 00100	Laporan hasil Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	-	1	1	1		T
52	2.11.0 00102	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	1	1	1	1		T
53	2.11.0 00104	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/ menolak izin dimaksud			1	1		

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
54	2.11.0 00105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	1	3	3	-		T
55	2.11.0 00106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	0	0	0		T
56	2.11.0 00107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	28	31	31	31		T
57	2.11.0 00108	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	28	31	31	31		T
58	2.11.0 00113	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	0	0	0		T
59	2.11.0 00114	Lokasi Proklamasi yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	Data lokasi proklamasi di kabupaten/kota	1	5	4	4		T
	2.11.0 00118	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	5916	7250		T
61	2.11.0 00120	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0		T
62	2.11.0 00122	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0		T
63	2.11.0 00124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	-	-	900	1500		T
64	2.11.0 00125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	-	-	200	840		T
65	2.11.0 00126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		200	330	840		T
66	2.11.0 00128	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	50,00	68,36	61,97	62,78		T
67	2.11.0 00129	Nilai IKAL n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku	30,98	24,91	28,74	34,41		T
68	2.11.0 00130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.	56,03	61,89	63,67	63,69		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
69	2.11.0 00131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	30,98	24,91	28,74	34,41		T
70	2.11.0 00132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukkan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	75,18	75,88	84,15	80,38		T
71	2.11.0 00133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup	-	-	4	4		T
72	2.11.0 00135	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	12	25	48	99		T
73	2.11.0 00143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah	367	12	34	29		T
74	2.11.0 00144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	367	12	34	29		T
75	2.11.0 00146	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD	4	4	4	4		T
76	2.11.0 00147	PPLHD Eksisting	Orang	Data PPLHD yang aktif	4	4	4	4		T
77	2.11.0 00148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	4	4	4	4		T
78	2.11.0 00149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Data kebutuhan PPLHD	4	4	4	4		T
79	2.11.0 00153	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	98		T
80	2.11.0 00155	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	-	-	-	-		T
81	2.11.0 00156	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah	-	122	55	100		T
82	2.11.0 00158	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah	-	198	223	224		T
83	2.11.0 00159	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	2	1	1	1		T
84	2.11.0 00160	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah	1659	4671	1445	450		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
85	2.11.0 00161	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0		T
86	2.11.0 00163	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	0	0	0		T
87	2.11.0 00165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	1	153	154	260		T
88	2.11.0 00167	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah	-	31	31	31		T
89	2.11.0 00168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	12	25	48	80		T
90	2.11.0 00172	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	####	335.75 2	582.506	601.93 0,57		T
91	2.11.0 00174	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	####	25.527	96.000	95.451 ,46		T
92	2.11.0 00175	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	####	310.22 5	486.506	506.47 9,11		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
93	2.11.0 00176	Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	90.591	24.994	93.996	93.545 ,46		T
94	2.11.0 00177	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)	####	310.22 5	486.506	506.47 9,11		T
95	2.11.0 00181	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara	Unit	Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten /Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	1	3	3	3		T
96	2.11.0 00186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	-	7	7	6		T
97	2.11.0 00189	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan		-	1	1		T
98	2.11.0 00191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.		-	1	1		T
99	2.11.0 00192	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)	-	198	223	224		T
100	2.11.0 00195	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	12	25	48	99		T
101	2.11.0 00197	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				31		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
102	2.11.0 00200	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	367	12	34	31		T
103	2.11.0 00201	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan	183	285	321	275		T
104	2.11.0 00217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS	1	1	1	1		T
105	2.11.0 00218	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	1	1	1	1		T
106	2.11.0 00220	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah	1	1	1	1		T
107	2.11.0 00221	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).	1	1	1	1		T
108	2.11.0 00224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup	-	5	5	6		T
109	2.11.0 00230	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Nilai yang menunjukkan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	-	5	5	6		T
110	2.11.0 00231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	-	7	7	6		T
111	2.11.0 00232	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi	-	1	1	1		T
112	2.11.0 00234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi	2	6	6	6		T
113	2.11.0 00236	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait	-	1	1	1		T
114	2.11.0 00238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan		77	77	77		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
115	2.11.0 00246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4	4	4	4		T
116	2.11.0 00247	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	18	45	48		T
117	2.11.0 00250	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	12	25	48	99		T
118	2.11.0 00251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD	4	4	4	4		T
119	2.11.0 00252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	Tersedianya data PPLHD yang aktif	4	4	4	4		T
120	2.11.0 00253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	4	4	4	4		T
121	2.11.0 00254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Tersedianya data kebutuhan PPLHD	4	4	4	4		T
122	2.11.0 00255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah	4	4	4	4		T
123	2.11.0 00256	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton		-	-	-	-		T
124	2.11.0 00257	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Unit	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	1	3	3	3		T
125	2.11.0 00259	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)		198	223	259		T
126	2.11.0 00268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	-	163	144	160		T
127	2.11.0 00269	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi maupun aktivitas remediasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	0	0	0		T
128	2.11.0 00279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya	50	68,36	61,97	63,69		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
129	2.11.0 00280	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	<ol style="list-style-type: none"> tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK, Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU) 	82	71,82	75,36	80,12		T
130	2.11.0 00281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	-	-	1	1		T
131	2.11.0 00282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah			1	1		T
132	2.11.0 00283	Tersusunnya dokumen SLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah			1	1		T
133	2.11.0 00286	Volume sampah yang didaur ulang	Ton	<ol style="list-style-type: none"> tersedianya data jumlah sampah yang di daur ulang tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 	####	24.960	93.868	93.545 ,46		T
134	2.11.0 00287	Volume sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	tersedianya data jumlah sampah yang di dimanfaatkan kembali	123	34	128	124,8		T
135	2.11.0 00288	Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	<ol style="list-style-type: none"> jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) 	####	310.22 5	486.506	506.47 9,11		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
136	2.11.0 00289	Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	####	310.22 5	486.506	506.47 9,11		T
137	2.11.0 00290	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	####	335.75 2	582.506	601.93 0,57		T
138	2.11.0 00303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya				1		T
139	2.11.0 00305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya				1		T
140	2.11.0 00306	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Usaha/ Kegiatan	Data dan informasi terkait izin usaha dan/atau kegiatan yang izinnnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berada dalam lingkup kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				215		T
141	2.11.0 00307	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Usaha/ Kegiatan	Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima persetujuan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				215		T
141	2.11.0 00308	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Usaha/ Kegiatan	Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sedang berada dalam proses pengawasan.				215		T
142	2.11.0 00310	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Usaha/ Kegiatan	Data dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi objek pengawasan aktif.				215		T
143	2.11.0 00311	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	Dokumen	Dokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				1		T
144	2.11.0 00313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya				1		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
145	2.11.0 00314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup				1		T
146	2.11.0 00319	Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting				249		T
147	2.11.0 00320	Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan				26		T
148	2.11.0 00325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.				4		T
149	2.11.0 00327	Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah	Badan Usaha	tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.				1		T
150	2.11.0 00331	sesuai dengan kewenangannya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya				-		T
151	2.11.0 00332	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah				1		T
152	2.11.0 00335	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah				1		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
153	2.11.0 00336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.				1		T
154	2.11.0 00344	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup				4		T
155	2.11.0 00345	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.				4		T
156	2.11.0 00346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS				100		T
157	2.11.0 00347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.				80		T
158	2.11.0 00348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.				4		T
159	2.11.0 00349	Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis	Laporan / Dokumen	Tersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis				1		T
160	2.11.0 00350	Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali				128.8		T

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2020	2022	2023	2024	2025	Disabled
161	2.11.0 00351	Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah				506.47 9,11		T
162	2.11.0 00352	jumlah tonase sampah yang didaur ulang	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berhasil didaur ulang				93.545 ,46		T
163	2.11.0 00357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	####	1.722, 60	1.768,94	1.731, 92		T
164	2.11.0 00358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan	####	628.74 9,22	645.661, 28	633.88 1,33		T

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan hasil pembahasan awal Renja berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Medan Tahun 2025.

Rancangan awal Renja tahun 2024 untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merencanakan alokasi anggaran belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk pembayaran gaji PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sedangkan untuk Belanja langsung dilaksanakan untuk pelayanan dan pembangunan bidang Lingkungan Hidup. Untuk belanja langsung telah direncanakan 11 program dengan 21 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 105.785.132.964. Tabel II.10 adalah Tabel Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

TABEL II.17
Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Tahun 2024

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	ANGGARAN			SISA ANGGARAN (Rp)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
Tujuan 1 :	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	6.521.791.630	5.559.501.343	85,25%	962.290.287
Sasaran 1 :	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	6.521.791.630	5.559.501.343	85,25%	962.290.287
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia				
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	956.006.200	914.776.200	95,69%	41.230.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	650.480.000	546.126.361	83,96%	104.353.639
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerin tah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	179.752.380	2.400.000	1,34%	177.352.380
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Per lindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100.790.340	64.261.400	63,76%	36.528.940
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pence gahan pencemaran lingkungan hidup	3.689.119.525	3.192.033.871	86,53%	497.085.654
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	51.519.725	50.000.000	97,05%	1.519.725

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN			SISA ANGGARAN (Rp)
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	694.932.780	609.850.011	87,76%	85.082.769
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup	199.190.680	180.053.500	90,39%	19.137.180
Tujuan 2 :	Peningkatan sampah terkelola di Kota Medan	64.065.888.762	57.037.022.211	89,03%	7.028.866.551
Sasaran 1 :	Meningkatnya penanganan sampah	3.099.990.000	2.789.401.368	89,98%	310.588.632
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Volume sampah yang ditangani	3.099.990.000	2.789.401.368	89,98%	310.588.632
Sasaran 2 :	Meningkatnya pengurangan sampah	60.965.898.762	54.247.620.843	88,98%	6.718.277.919
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Terkelola	10.549.969.880	9.953.664.641	94,35%	596.305.239
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	50.415.928.882	44.293.956.202	87,86%	6.121.972.680
TOTAL		70.587.680.392	62.596.523.554	88,68%	7.991.156.838

TABEL II.18
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Medan Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Volume sampah yang ditangani	449.867 Ton	7.984.587.000	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Volume Sampah yang ditangani	449867 Ton	7.984.587.000	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	100%	7.984.587.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota		Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	100%	7.984.587.000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100%	81.514.924.784	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100%	81.514.924.784	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100%	1.262.050.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	1.262.050.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	23.297.595.403	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	23.297.595.403	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100%	16.627.073.550	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	100%	16.627.073.550	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	11.087.240.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	100%	11.087.240.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100%	1.018.380.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100%	1.018.380.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	100%	20.048.423.329	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	20.048.423.329	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.066.162.502	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	8.066.162.502	
	Penataan Organisasi		Persentase cakupan penataan organisasi	100%	108.000.000	Penataan Organisasi		Persentase Cakupan Penataan Organisasi	100%	108.000.000	
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	100%	1.291.450.000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	100%	1.291.450.000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	3 Dokumen	913.900.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	2 Dokumen	913.900.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	1 Dokumen	377.550.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	1 Dokumen	377.550.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100%	5.337.183.492	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100%	5.337.183.492	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	8 Dokumen	4.997.806.332	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	3 Laporan	4.997.806.332	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	100%	338.477.160	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	100%	338.477.160	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	45%	900.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	45%	900.000	
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30,94 Indeks	1.102.331.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Indeks kualitas tutupan lahan	30 Indeks	1.102.331.000	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	3 Hektar	1.102.331.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik	1 Ha	1.102.331.000	
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	150.900.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0%	150.900.000	

No	Rancangan Awal RKPd 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyimpanan sementara Limbah B3		Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	100%	150.900.000	Penyimpanan sementara Limbah B3		Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	0%	150.900.000	
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	90%	53.700.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	90%	53.700.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	90%	53.700.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	90%	53.700.000	
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	95%	1.397.095.100	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	90%	1.397.095.100	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1.397.095.100	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1.397.095.100	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase penghargaan lingkungan hidup	90%	228.754.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase penghargaan lingkungan hidup	90%	228.754.000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	4 Kegiatan	228.754.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	4 Kegiatan	228.754.000	
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	56.260.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	56.260.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	56.260.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	56.260.000	
11	Program Pengelolaan Persampahan	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase volume sampah yang terkelola	73%	3.783.749.500	Program Pengelolaan Persampahan	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase volume sampah yg terkelola	73%	3.783.749.500	
	Pengelolaan Sampah		Timbulan sampah yang terkelola	71%	3.783.749.500	Pengelolaan Sampah		Timbulan sampah yang terkelola	71%	3.783.749.500	
	Total				102.900.934.876					102.900.934.876	

2.5. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat RPJMD 2021-2025 : Medan Membangun

Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni, indikator ini mengukur persentase kawasan permukiman yang memenuhi syarat kelayakan huni. Target untuk 2024 adalah 98,9%, dengan capaian pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian rata-rata mencapai 99,29% dengan pencapaian 99,80% pada 2023 dan 98,9% pada 2024, yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan berhasil meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan. Pencapaian 101,23% pada 2021 dan 100,52% pada 2022 menggambarkan kesuksesan dalam pencapaian target permukiman layak huni, meskipun sedikit penurunan terpantau pada tahun 2023 (99,80%).

Luas Kawasan Permukiman Layak Huni, indikator ini mengukur perluasan kawasan permukiman layak huni dalam satuan luas (hektar). Target yang ditetapkan untuk 2024 adalah 27.850,05 Ha, dengan pencapaian yang baik pada 2021 hingga 2024. Capaian rata-rata sebesar 106,36% menandakan peningkatan yang konsisten dalam pengembangan kawasan permukiman layak huni. Pencapaian pada 2021 adalah 101,22%, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 107,33% pada 2022, 107,03% pada 2023, dan 106,36% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa program pengembangan kawasan permukiman layak huni berjalan efektif, dan luas kawasan yang dibangun melebihi target yang ditetapkan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, indikator ini mengukur kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam indeks kualitas lingkungan. Target untuk 2024 adalah 58,05 poin, dengan pencapaian yang cenderung stabil pada 57,82 poin pada tahun 2023 dan 58,05 poin pada 2024. Capaian rata-rata untuk 2021-2024 adalah 92,07%, mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup berjalan baik, meskipun ada sedikit fluktuasi di tahun 2021 yang menunjukkan nilai lebih rendah (56,03 poin). Capaian yang lebih tinggi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), indikator ini mengukur proporsi ruang terbuka hijau di Kota Medan, yang sangat penting untuk kualitas

lingkungan. Target untuk 2024 adalah 13,5%, namun pencapaian di 2021 menunjukkan 6,73%, yang jauh dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 (7,3%) dan 7,3% pada 2023, namun masih jauh dari target yang diinginkan. Rata-rata capaian selama empat tahun adalah 49,85%, yang mencerminkan kinerja kurang optimal dalam peningkatan ruang terbuka hijau. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih tinggi dan mempercepat pembangunan ruang terbuka hijau di Medan, yang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, Misi Keempat: Medan Membangun menunjukkan pencapaian yang baik pada indikator yang terkait dengan kawasan permukiman layak huni dan luasnya kawasan yang dibangun, dengan capaian rata-rata 88,95% hingga 106,36%. Sementara itu, indikator kualitas lingkungan hidup menunjukkan hasil yang stabil, namun ada tantangan pada ruang terbuka hijau (RTH) yang masih jauh dari target. Untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang lebih baik, perbaikan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perlu menjadi fokus utama pada tahun-tahun mendatang.

TABEL II.19
Pencapaian Target RPJMD Kota Medan 2021-2024 untuk Misi Keempat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kota pada RKPD Kota Tahun				Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	Misi Keempat : Medan Membangun															
4,1	Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota yang Layak Huni	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni (%)	96,9	99,4	96,9	97,9	98,4	98,9	98,09	98,41	98,2	98,2	101,23%	100,52%	99,80%	99,29%
4.1.1	Meningkatnya Luas Kawasan Permukiman Layak Huni	Luas Kawasan Permukiman Layak Huni (Ha)	25.690,20	26.349,08	25.690,20	25.857,56	26.021,52	26.185,48	26.003,40	27.751,97	27.850,05	27.850,05	101,22%	107,33%	107,03%	106,36%
4,2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,6	58,5	57,6	57,82	58,05	58,27	56,03	61,89	63,67	63,69	97,27%	107,04%	109,68%	109,30%
4.2.1	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau /RTH (%)	10	V	12	12,5	13	13,5	6,73	6,73	6,73	6,73	56,08%	53,84%	51,77%	49,85%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													88,95%	92,18%	92,07%	91,20%
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi ataupun dari Perangkat Daerah maupun dari hasil penelitian di lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kota. Ada 18 usulan Musrenbang Kecamatan dan 29 Usulan Pokir DPRD Kota Medan Tahun 2025.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh diawali dari usulan masyarakat dituangkan dalam Musyawarah Kelurahan :

- a. Membuat jadwal Musrenbang (akun TAPD Perencanaan)
- b. Membuat akun User Kelurahan oleh akun admin (Sekda)
- c. Membuat akun User Mitra Bappeda oleh akun TAPD Perencanaan
- d. Membuat akun User Verifikator Kecamatan oleh akun Camat
- e. Membuat akun User Verifikator OPD oleh oleh akun Kadis
- f. Membuat akun TAPD Perencanaan oleh akun admin
- g. Membuat kamus usulan aspirasi masyarakat oleh akun TAPD Perencanaan
- h. Validasi/verifikasi usulan Musrenbang Kelurahan oleh akun Bappeda
- i. Validasi/verifikasi usulan musrenbang oleh akun verifikator kecamatan
- j. Validasi/verifikasi usulan musrenbang oleh akun verifikator Dinas Lingkungan Hidup setelah selesai forum OPD
- k. Validasi/verifikator oleh TAPD perencanaan yang dilakukan setelah selesai Musrenbang Kota

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Adapun usulan yagn didapat dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan terkait yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Bidang yang menangani di Bappeda adalah Bidang infrastruktur dan kewilayahan dimana pada umumnya adalah tentang persampahan diantaranya :

- a. Pelatihan Atau Pendampingan Keterampilan Pengelolaan Sampah Atau Daur Ulang Sampah
- b. Pengadaan Tong Sampah Komunal
- c. Pengadaan Tong Sampah Terpilah
- d. Pembangunan Tem-pat Penam-pungan Sementara (TPS)
- e. Penyediaan Becak Sampah
- f. Pengadaan Truk Dan Bak Arm Roll 6 M3 Lebih lengkap lihat tabel II.20 dan II.21

TABEL II.20
Usulan Musrenbang Kecamatan Kota Medan Tahun 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	DETAIL ANGGARAN
1	Kecamatan Medan Area	Pelatihan manajemen Bank Sampah	banyaknya sampah masyarakat yang tidak bisa didaur ulang	Jl. Rahmadsyah No. 2 Medan	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 12 Kegiatan Harga Satuan : Rp 300.000 Anggaran : Rp 3.600.000
2	Kecamatan Medan Barat	Pelatihan manajemen Bank Sampah	untuk menambah pengetahuan mengenai sampah	Kantor Camat Medan Barat	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 30 Kegiatan Harga Satuan : Rp 300.000 Anggaran : Rp 9.000.000
3	Kecamatan Medan Kota	Penyediaan mesin cacah bank sampah	belum ada Mesin Cacah Bank Sampah di Kecamatan Medan Kota	Jl. Kemiri II Kelurahan Sudirejo II	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 1 unit Harga Satuan : Rp 200.000.000 Anggaran : Rp 200.000.000
4	Kecamatan Medan Labuhan	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Banyak sampah sehingga memerlukan pembangunan TPS baru	Kelurahan tangkahan	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 1 unit Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 Anggaran : Rp 1.000.000.000
5	Kecamatan Medan Maimun	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	tidak adanya lahan pengumpulan tempat sampah sebelum diangkut	rumah bapak sabri tanjung pendiri bank sampah Kelurahan aur	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 1 unit Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 Anggaran : Rp 1.000.000.000
6	Kecamatan Medan Maimun	Penyediaan becak sampah	masih kurangnya alat pengangkut sampah di lokasi bank sampah	rumah warga pak sabri tanjung kelurahan aur	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 2 unit Harga Satuan : Rp 35.500.000 Anggaran : Rp 71.000.000
7	Kecamatan Medan Maimun	Pelatihan manajemen Bank Sampah	kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait tentang sampah baik bidang marketing dan pemilahnannya	kelurahan aur	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 2 Kegiatan Harga Satuan : Rp 300.000 Anggaran : Rp 600.000
8	Kecamatan Medan Perjuangan	Pengadaan Truk dan Bak Arm roll 6 m3	armada truk sampah rusak berat	Jl Pendidikan No 89 Kel Tegal Rejo Kec Medan Perjuangan	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 1 unit Harga Satuan : Rp 550.000.000 Anggaran : Rp 550.000.000
9	Kecamatan Medan Perjuangan	Penyediaan becak sampah	armada kebersihan becak sampah rusak	Jl Pendidikan No 89 Kel Tegal Rejo Kec Medan Perjuangan	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 10 unit Harga Satuan : Rp 35.500.000 Anggaran : Rp 355.000.000
10	Kecamatan Medan Tembung	Penyediaan becak sampah	Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengangkat sampah	Kantor Camat Medan Tembung	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 7 unit Harga Satuan : Rp 35.500.000 Anggaran : Rp 248.500.000

NO	PENGUSUL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	DETAIL ANGGARAN
11	Kecamatan Medan Tembung	pelatihan atau pendampingan keterampilan pengelolaan sampah atau daur ulang sampah	Kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah	Kantor Camat Medan Tembung	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 2 Kegiatan Harga Satuan : Rp 30.000.000 Anggaran : Rp 60.000.000
12	Kecamatan Medan Tuntungan	pembangunan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	Timbulan sampah yang begitu besar, pemerintah Kecamatan tidak bisa hanya mengandalkan TPA yang jaraknya sangat jauh dari lokasi untuk menyelesaikan persoalan sampah	Depan Pasar Induk Lau Cih kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 1 unit Harga Satuan : Rp 30.000.000.000 Anggaran : Rp 30.000.000.000
13	Kelurahan Bagan Deli - Kecamatan Medan Belawan Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya Narkoba Kelurahan Rawan Tuberkulosis	pelatihan atau pendampingan keterampilan pengelolaan sampah atau daur ulang sampah	Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Sampah (Daur Ulang Sampah)	Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 1 Kegiatan Harga Satuan : Rp 30.000.000 Anggaran : Rp 30.000.000
14	Kelurahan Pasar Baru - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Tong sampah yang minim dan cepat rusak serta hilang, yang membuat sampah bertumpuk pada 1 titik sehingga berterbangan dan berserak	jl. surabaya, jl. pandu, jl. bogor, jl. semarang, jl. selat panjang, disetiap lingkungan kelurahan pasar baru	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 100 unit Harga Satuan : Rp 1.700.000 Anggaran : Rp 170.000.000
15	Kelurahan Perintis - Kecamatan Medan Timur Kelurahan Waspada Narkoba	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	1. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan volume sampah. 2. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. 3. Kondisi bak sampah yang sudah rusak atau tidak memadai. 4. Kebutuhan akan pengelolaan sampah yang higienis dan ramah lingkungan. 5. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.	Lingkungan I, II, III, IV dan V di Kelurahan Perintis	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 10 unit Harga Satuan : Rp 1.700.000 Anggaran : Rp 17.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	DETAIL ANGGARAN
16	Kelurahan Sidorame Barat - II - Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Waspada Narkoba Kelurahan Rawan Tuberkulosis	Penyediaan becak sampah	Becak Pengangkut sampah Kelurahan Sidorame Barat II Rusak	Kelurahan Sidorame Barat II	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 1 unit Harga Satuan : Rp 35.500.000 Anggaran : Rp 35.500.000
17	Kelurahan Sukaramai — I - Kecamatan Medan Area Kelurahan Waspada Narkoba Kelurahan Rawan Tuberkulosis	Penyediaan becak sampah	maraknya pembuangan sampah liar di ruas Jalan AR. Hakim, Jalan Sutrisno serta diruas jalan Medan Area Selatan, menyebabkan kesan kotor di wilayah, sehingga memerlukan angkutan tambahan untuk penyisiran sampah liar, membantu truk sampah	Jalan AR. Hakim	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 3 unit Harga Satuan : Rp 35.500.000 Anggaran : Rp 106.500.000
18	Kelurahan Tegal Sari Mandala — II - Kecamatan Medan Denai Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya Narkoba Kelurahan Rawan Tuberkulosis	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Sampah berserakan di jalan sehingga perlu tong sampah organik dan non organik	wilayah Kelurahan Tegal sari Mandala II	Dinas Lingkungan Hidup	Volume : 15 unit Harga Satuan : Rp 1.700.000 Anggaran : Rp 25.500.000

TABEL II.21
Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Medan Tahun 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
1	Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Tidak ada tempat sampah di Gereja yang di jalan Pancur Batu	Jalan Pancur Batu Medan, Kota Medan	DLH	1	satuan
2	Lailatul Badri, A.Md.	Pembangunan TPS	Sampah-sampah yang ada di sepanjang Jl. Alfalah IV agar diangkut secara berkala	Jl. Alfalah 4, Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan (di sepanjang jalan), Kota Medan	DLH	150	meter
3	Lailatul Badri, A.Md.	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Sampah-sampah yang ada di sepanjang Jl. Alfalah VI agar diangkut secara berkala karena sampah dibuang ke parit sehingga lingkungan banjir	Jl. Alfalah 6, Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Kota Medan	DLH	150	meter
4	Reinhart Jeremy Aninditha, S.H.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	banyak sampah yang beserakan di sekitar lingkungan	jl. Alfaka 1 link 3 kec : medan deli kel. tanjung mulia hilir, Kota Medan	DLH	10	unit
5	Dodi Robert Simangunsong, S.H.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Warga mengeluhkan persoalan persampahan yang tidak terkontrol selain menimbulkan aroma tidak sedap, juga dikhawatirkan menyebabkan wabah penyakit.	Jl. Turi Gg. Rumah Panjang, Kota Medan	DLH	10	Unit
6	Janses Simbolon	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Pengadaan Tong Sampah	lorong 8 kesehatan kompleks Baru, Lorong 8 kompleks Baru, lingk. 13. Sei Mati, Medan Labuhan, Kota Medan	DLH	40	unit
7	Reza Pahlevi Lubis, S.Kom.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Masyarakat Jalan Karya Gg. Bidan Kel. Karang Berombak Kec.Medan Barat Meminta agar penyediaan tempat pembuangan sampah disetiap gang dan penjemputan sampah rutin secara gratis	Jalan Karya Gg. Bidan Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat, Kota Medan	DLH	50	buah
8	Rommy Van Boy	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Masyarakat meminta agar menyediakan tempat sampah di setiap gang	jl pipa II kel sari rejo kecamatan medan polonia, Kota Medan	DLH	20	unit

NO	PENGUSUL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
9	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Banyaknya sampah di daerah tersebut dikarenakan tidak adanya tong sampah di lokasi tersebut	Jl Sehati Gg Kenari 11 Tegal Rejo Kec Medan Perjuangan Di Dekat Greja Hkbp Tegal Rejo, Kota Medan	DLH	2	pcs
10	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Perlu adanya 6 pcs untuk tong sampah di sepanjang daerah tersebut	Gg Kucica I No 14 Glugur Darat Kecamatan Medan Timur, Kota Medan	DLH	6	pcs
11	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk daerah tersebut diberikan tong sampah dikarenakan masyarakat tidak mempunyai tempat untuk membuang sampah	Jl Pertiwi Kecamatan Medan Tembung 20224 Lurusan Jln Gg Padang, Kota Medan	DLH	2	pcs
12	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk daerah tersebut diperlukan tongsampah dikarenakan tidak adanya tempat sampah	Jl Pertiwi No 111538 Kecamatan Medan Tembung Di Samping Yayasan Perguruan Ira, Kota Medan	DLH	2	pcs
13	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Diperlukan tong sampah di daerah tersebut dikarenakan tidak adanya tong sampah sehingga oknum membuang sampah sembarangan	Jl Pukat Iv Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan	DLH	2	pcs
14	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk disepanjang jalan tersebut di berikan tong sampah	Jl Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Depan Jl Greja, Kota Medan	DLH	3	pcs
15	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk di berikannya tong sampah di daerah tersebut	Jl Ambai Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan	DLH	2	pcs
16	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Taduan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan	DLH	2	pcs
17	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Pancing Simpang Aksara Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan	DLH	2	pcs
18	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Tuasan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan	DLH	2	pcs
19	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Pasar IV Gg Lestari Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan	DLH	3	PCS

NO	PENGUSUL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
20	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Panglima Sentosa Baru Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan	DLH	2	pcs
21	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Sering Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan	DLH	2	pcs
22	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Sesar Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan	DLH	2	pcs
23	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Mesjid Taufik Ujung Depan Rumah Putih Besar Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan	DLH	2	pcs
24	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Tangkul II Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan	DLH	2	pcs
25	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Gg Abadi Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan	DLH	2	pcs
26	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Medan Utara/ Tempuling li Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan	DLH	2	meter
27	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk diberikannya tong sampah didaerah tersebut	Jl Setia Budi Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan	DLH	3	pcs
28	Andreas Pandapotan Purba, S.Ak.	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Masyarakat meminta untuk di daerah tersebut di berikannya tong sampah	Jl Pasar IV Gg Lestari Lingkungan V Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan	DLH	2	pcs
29	dr. Faisal Arbie, M.Biomed.	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Mohon pengadaan tong sampah di setiap lingkungan	Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan	DLH	16	buah

2.7. Data Terpilah Pengarusutamaan Gender Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2024 melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan pengarusutamaan gender pria dan wanita. Adapun program dan sub kegiatan dapat dilihat pada TABEL II.22

TABEL II.22

Data Gender Pada Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Gender	
					Pria	Wanita
1	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Daerah Kab/ Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Pembinaan GPBLHS	82	118
				b. Dukungan Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian	112	88
				c. Pendampingan Sekolah Adiwiyata	164	236
				d. Pendataan Pengurangan Sampah di Masyarakat	59	41
2	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	a. Pendampingan Kegiatan Komunitas Penggiat Lingkungan/Pemerhati Sampah Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	205	295
				b. Pendampingan Kepada Komunitas/ Penggiat Lingkungan dan Sosialisasi/Pelatihan Pengelolaan Sampah	115	385
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	823	1177
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi dan Peraturan Per-UU-an di bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH	Melakukan Pengawasan Kepada Usaha dan/Atau Kegiatan (Sebanyak 180 kali 3 SPT(4 orang)	400	400
4	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	a. Rapat Pendahuluan Penyusunan IKPLHD	12	16

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Gender	
					Pria	Wanita
				b. Rapat Antara Pemantauan Isu Prioritas c. Rapat Laporan Akhir Penyusunan IKPLHD d. Rapat Pendahuluan Penyusunan Dokumen IKLH e. Rapat Laporan f. Rapat Laporan Akhir	28 13 15 11 14	20 20 14 16 16
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota	a. Kick Off Meeting Pembuatan Dokumen KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 b. Dokumen KLHS RPJPD Kota Medan Tahun 2025 c. KP I Pembuatan Dokumen KLHS RPJPD Kota Medan Tahun 2025- 2029 d. KP I Dokumen KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 e. FGD Pembuatan Dokumen KLHS RPJPD Kota Medan Tahun 2025- 2045 dan Pembuatan Dokumen KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 f. KP II Pembuatan Dokumen KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2025- 2029 g. KP 2 Pembuatan Dokumen KLHS RPJPD Kota Medan Tahun 2025- 2045 h. Rapat Laporan Akhir Pembuatan KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029	20 19 24 27 30 24 12 21	27 32 21 22 23 23 16 23
5	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	a. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional b. Peringatan Hari Bumi	30 495	70 505

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik hukum dan keamanan.

Untuk Kabupaten/Kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota. Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya ini tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/kota yang direncanakan.

Pembangunan nasional merupakan upaya komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan pada Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilakukan secara bertahap mulai dengan pembangunan dengan jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan visi dan misi untuk periode 2024–2029, yang dikenal sebagai "Asta Cita" dan didukung oleh 17 program prioritas.

TABEL III.1
Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Medan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

Keterkaitan Visi		
RPJMD Kota Medan	RPJMD Sumatera Utara	RPJMN Indonesia
Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data	Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Keterkaitan Kata Kunci		
Medan Bertuah	Kolaborasi Sumut Berkah	Indonesia Emas
Inklusif	Unggul	
Maju	Maju	Maju
Berkelanjutan	Berkelanjutan	Bersama
Transformasi		
Medan Satu Data		

TABEL III.2
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kota Medan dengan RPJPD Kota Medan

RPJMD Kota Medan	RPJPD Kota Medan
Visi : Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data	Visi : Medan Kota Global, Inklusif, Maju dan Berkelanjutan
2. Misi ENERGIK: Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan dengan mengedepankan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil, Merata dan Berkualitas berdasarkan daya dukung dan daya tampung wilayah berbasis karakteristik wilayah Misi 7 : Mewujudkan pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
4. Misi TERTIB: Mewujudkan penataan kota yang semakin teratur, cantik, rapi, bersih, dan mendorong budaya taat aturan ditengah-tengah masyarakat	Misi 4 : Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah melalui penegakan hukum, penciptaan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman, stabilitas ekonomi makro, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan serta kebebasan demokrasi yang terjamin Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang kokoh dengan menciptakan ketahanan keluarga, kesetaraan gender, lingkungan hidup, ketahanan energi, air, kemandirian pangan serta resiliensi terhadap bencana dan ketahanan iklim Misi 7 : Mewujudkan pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Visi RPJMD Kota Medan 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Medan „Bertuah” yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”, selaras dan menjadi bagian integral dari visi jangka panjang

dalam RPJPD Kota Medan 2025–2045, yaitu “Medan Kota Global, Inklusif, Maju dan Berkelanjutan”. Keterkaitan antara kedua dokumen perencanaan Kota Medan ini tercermin melalui penguatan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan, dan transformasi sosial yang dituangkan dalam tujuh misi RPJMD yang sejalan dengan delapan misi jangka panjang. Misi-misi dalam RPJMD, seperti pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, penguatan budaya sebagai identitas kota, tata kelola pelayanan publik yang berbasis data dan inovasi, serta jaminan sosial bagi kelompok rentan, merupakan fondasi utama dalam mencapai tujuan RPJPD yang berfokus pada pembangunan manusia, daya saing ekonomi, stabilitas tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan infrastruktur. Sinergi antara kedua dokumen ini memperkuat kesinambungan pembangunan Kota Medan, memastikan bahwa prioritas jangka menengah mendukung arah transformasi jangka panjang menuju kota yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

TABEL III.3
Keterkaitan Misi RPJMD Kota Medan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN Indonesia

RPJMD Kota Medan	RPJMD Sumatera Utara	RPJMN Indonesia
2. Misi ENERGIK: Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan dengan mengedepankan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Misi 4 : Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
4. Misi TERTIB: Mewujudkan Penataan Kota Yang Semakin Teratur, Cantik, Rapi, Bersih, Dan Mendorong Budaya Taat Aturan Ditengah-Tengah Masyarakat	Misi 4 : Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

A. Pemetaan 8 Asta Cita Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Visi: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas

2045." Misi (Asta Cita):

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro maritime industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi gen Z) dan penyandang disabilitas;
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industrialisasi berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur ; Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dinas Lingkungan Hidup masuk pada astacita ke 2 dan 8, lihat TABEL III.4

TABEL III.4
Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap Asta Cita Presiden

8 ASTACITA PRESIDEN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET/SATUAN	LOKASI
ASTACITA 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) 2. Pengelolaan persampahan 	<p style="text-align: center;">1.100%</p> <p style="text-align: center;">2.74%</p>	Seluruh Kecamatan
ASTACITA 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 2. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 3. Perencanaan lingkungan hidup 4. Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 5. Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) 6. Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) 7. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 8. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 9. Penanganan pengaduan lingkungan hidup 	<p style="text-align: center;">453320 Ton</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">31,61 Indeks</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>	Kota Medan

B. Pemetaan 17 Program Prioritas Nasional Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, pemerintah telah menetapkan 17 program prioritas, antara lain:

- Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
- Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
- Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
- Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- Pemberantasan kemiskinan.
- Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
- Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
- Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
- Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
- Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
- Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
- Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
- Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
- Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- Program-program ini dirancang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup masuk ke program prioritas 11, lihat TABEL III.5

TABEL III.5

Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap 17 Prioritas Nasional

17 PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET / SATUAN	LOKASI
Prog Prioritas 11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	1. Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	2,74%	Seluruh Kota Medan
		2. Perencanaan lingkungan hidup	2. Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	100%	
		3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3. Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100%	
		4. Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	4. Indeks kualitas tutupan lahan	31,61 Indeks	

C. Pemetaan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

- Delapan program "Hasil Terbaik Cepat" (PHTC) yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dampak signifikan dalam waktu singkat adalah sebagai berikut :
- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas
- as di
- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
- Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
- Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan),

TNI/POLRI, dan pejabat negara.

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
- Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
- Program-program ini adalah prioritas yang akan diimplementasikan dengan cepat untuk memberikan hasil yang nyata kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup masuk Program Hasil Terbaik Cepat ke 7, lihat TABEL III.6

TABEL III.6
Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHCT)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	LOKASI
Quick Wins 7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan	1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1. Volume Sampah yang ditangani	453320 Ton	TPA Terjun dan di Kecamatan-Kecamatan
		2. Pengelolaan persampahan	2. Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	2, 74%	

D. Pemetaan Program Prioritas Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

- Revitalisasi pasar tradisional (dinas perdagangan)
- Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman kota
- Pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi yang terintegrasi dapat mengurangi kemacetan lalu lintas
- Kampanye edukasi tentang pengelolaan sampah dan daur ulang
- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur drainase kota
- Pembangunan pusat kreativitas anak muda
- Program pencegahan dan penanggulangan stunting
- Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya

- Penyediaan air bersih dan sanitasi layak di daerah kumuh
- Digitalisasi pendidikan berbasis smart class dan metaverse

Dinas Lingkungan Hidup masuk pada program prioritas ke 2 dan 4 lihat TABEL III.7

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Anggaran tahun berjalan tahun 2025 terbagi 2 yaitu anggaran sebelum perubahan dan anggaran setelah perubahan. Anggaran sebelum Perubahan sebesar Rp 99.769.241.730 Anggaran sesudah Perubahan Rp 70.066.509.958

TABEL III.7
Dukungan Terhadap Visi Misi Walikota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

isi	Tujuan/Sasaran/Program		Outcome	Indikator	Satuan	Tahun 2025						Target Tahun 2026			
						Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Bentuk Intervensi / Dukungan	Target	PHCT	PP NASIONAL	PP PROPINSI	Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Target
Misi Energik	1	Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan yang merata dan berkeadilan melalui penyediaan sarana dan prasarana berkualitas di seluruh wilayah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat		Indeks Infrastruktur	Satuan										
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	90	2.400.000	Tersedianya Informasi Dokumen Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang di fasilitasi dan jumlah perizinan berusaha	200 perusahaan	-	PPN 11 (Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup)	PP 14 (Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana)	90	53.700.000	200 perusahaan
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100	115.070.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan sanksi administratif	100	-	-	PP 14	100	56260000	100
		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	15,2	3271602800	Penangan dan pengurangan sampah, koordinasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	96.083 ton	Quick Wins 7	-	PP 14	15,3	3783749500	96.083 ton
		Program Pengembangan	Meningkatnya layanan	Persentase Peningkatan	Persen	72	6235875247	Penyusunan Rencana,	151 TPS/1	Quick Wins 7	PPN 11	PP 14	71,0	7984587000	151 TPS/1

isi	Tujuan/Sasaran/Program		Outcome	Indikator	Satuan	Tahun 2025						Target Tahun 2026			
						Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Bentuk Intervensi / Dukungan	Target	PHCT	PP NASIONAL	PP PROPINSI	Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Target
		Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	persampahan regional	Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional				Pembangunan Optimalisasi dan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	TPA						TPA
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Poin	54,11 77,47	5075724570	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 Dokumen	- -	PPN 11	- -	54,21 77,57	5337183492	19 Dokumen
Misi Tertib	2	Mewujudkan Kota Medan yang tertib, nyaman, dan berbudaya taat aturan melalui penataan ruang dan lingkungan hidup, pengelolaan transportasi, kebersihan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. (Beautification City - Estetika Perkotaan)		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*	Persen										
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap izin Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	90	2.400.000	Tersedianya Informasi Dokumen Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang difasilitasi dan jumlah perizinan berusaha	200 perusahaan	-	PPN 11	PP 14	90	53.700.000	200 perusahaan
		Program Penanganan	Meningkatnya penyelesaian	Persentase Penyelesaian	Persen	100	115.070.000	Penyelesaian Pengaduan	100	-	-	PP 14	100	56260000	100

isi	Tujuan/Sasaran/Program	Outcome	Indikator	Satuan	Tahun 2025							Target Tahun 2026			
					Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Bentuk Intervensi / Dukungan	Target	PHCT	PP NASIONAL	PP PROPINSI	Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Target	
		Pengaduan Lingkungan Hidup	sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup				Masyarakat dan sanksi administratif							
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Persen	6	1223696000	Penanaman Pohon Penghijauan di berbagai lokasi dan DED taman	4 Hektar	-	PPN 11	PP 14	6	1102331000	4 Hektar
		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	15,2	3271602800	Penangan dan pengurangan sampah, koordinasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	96.083 ton	Quick Wins 7	PPN 11	PP 14	15,3	3783749500	96.083 ton
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	100	151500000	Menyediakan Penyimpanan sementara Limbah B3	100	-	-	-	100	150900000	100
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Poin	54,11	5075724570	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 Dokumen	-	PPN 11	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	54,21	5337183492	19 Dokumen
				Indeks Kualitas Udara		77,47			-	77,57					
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kinerja pemangku ke-	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam	Persen	70	228754000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lem-	400 Entitas	-	-	PP 14	70	228754000	400 Entitas

isi	Tujuan/Sasaran/Program		Outcome	Indikator	Satuan	Tahun 2025						Target Tahun 2026			
						Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Bentuk Intervensi / Dukungan	Target	PHCT	PP NASIONAL	PP PROPINSI	Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Target
		untuk Masyarakat	pentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				baga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	85	1397095100	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2250	-	-	PP 14	90	1397095100	2250

E. Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Medan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang selaras dengan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, Kota Medan mengintegrasikan arah pembangunan dengan visi “Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.”

Melalui kolaborasi yang sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” serta mendukung pencapaian sasaran utama Pembangunan Jangka Menengah I, Kota Medan diarahkan menjadi kota yang berbudaya, energik, ramah, tertib, unggul, dan aman. Selain itu, pembangunan di Kota Medan juga berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola yang humanis, ramah, peduli, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya secara berkelanjutan.

TABEL III.8

Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Medan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

Keterkaitan Visi		
RPJMD Kota Medan	RPJMD Sumatera Utara	RPJMN Indonesia
Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data	Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Keterkaitan Kata Kunci		
Medan Bertuah	Kolaborasi Sumut Berkah	Indonesia Emas
Inklusif	Unggul	
Maju	Maju	Maju
Berkelanjutan	Berkelanjutan	Bersama
Transformasi		
Medan Satu Data		

TABEL III.9
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kota Medan dengan RPJPD Kota Medan

RPJMD Kota Medan	RPJPD Kota Medan
Visi : Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data	Visi : Medan Kota Global, Inklusif, Maju dan Berkelanjutan
2. Misi ENERGIK: Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan dengan mengedepankan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Adil, Merata dan Berkualitas berdasarkan daya dukung dan daya tampung wilayah berbasis karakteristik wilayah Misi 7 : Mewujudkan pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
4. Misi TERTIB: Mewujudkan penataan kota yang semakin teratur, cantik, rapi, bersih, dan mendorong budaya taat aturan ditengah-tengah masyarakat	Misi 4 : Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah melalui penegakan hukum, penciptaan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman, stabilitas ekonomi makro, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan serta kebebasan demokrasi yang terjamin Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang kokoh dengan menciptakan ketahanan keluarga, kesetaraan gender, lingkungan hidup, ketahanan energi, air, kemandirian pangan serta resiliensi terhadap bencana dan ketahanan iklim Misi 7 : Mewujudkan pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

F. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2025-2029

TABEL III.10.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data			
Misi Energik: Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan dengan mengedepankan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan			
1	Terwujudnya pembangunan kewilayahan dan lingkungan yang merata dan berkeadilan melalui penyediaan sarana	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur kewilayahan dan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah	1 Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Terpadu 2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur 3 Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas
			1 Memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 2 Mengembangkan rencana induk infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup transportasi, air bersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi. 3 Memastikan keselarasan antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana pengembangan infrastruktur.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data			
dan prasarana berkualitas di seluruh wilayah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat		4 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Berkelanjutan	4 Melakukan rehabilitasi dan peningkatan kualitas infrastruktur yang ada, termasuk jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik lainnya. 5 Membangun infrastruktur baru yang memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan. 6 Meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar, terutama di wilayah pinggiran dan daerah tertinggal. 7 Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan efisien. 8 Meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah kota. 9 Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. 10 Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. 11 Membangun mekanisme umpan balik masyarakat terkait infrastruktur. Mengembangkan sistem pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur 12 yang efektif dan efisien. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dan 13 pengelolaan infrastruktur. Memastikan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur.
Misi Tertib: Mewujudkan Penataan Kota yang semakin Teratur, Cantik, Rapi, Bersih, dan mendorong Budaya Taat Aturan ditengah-tengah masyarakat			
1 Terwujudnya Kota Medan yang tertib, nyaman, dan berbudaya taat aturan	1	Meningkatnya Kualitas Penataan ruang kota dan lingkungan hidup serta pengolahan limbah	1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Pengelolaan Limbah 5 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi
	2	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	1 Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu yang responsif gender. 2 Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang responsif gender.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data			
		Kota 4 Peningkatan Kesadaran Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 3 Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern, ramah lingkungan, yang responsif gender. 4 Penataan pedagang kaki lima (PKL) dan reklame. 5 Peningkatan kualitas trotoar dan fasilitas pejalan kaki. 6 Pengembangan program penghijauan dan penanaman pohon. 7 Penataan pencahayaan kota. 8 Pengembangan seni mural dan instalasi publik. 9 Kampanye edukasi tentang kebersihan dan keindahan kota. 10 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap 11 kebersihan dan keindahan kota. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah
	3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan sistem transportasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Transportasi Publik 2 Pengaturan Lalu Lintas 3 Pengembangan Transportasi Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi. 2 Pembangunan infrastruktur pendukung transportasi publik. 3 Penerapan sistem manajemen lalu lintas yang cerdas. 4 Peningkatan disiplin berlalu lintas. 5 Peningkatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. 6 Pengembangan jalur sepeda dan pejalan kaki 7 Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan transportasi. 8 Penyusunan peraturan daerah tentang transportasi berkelanjutan. Pengembangan area parkir yang terintegrasi
	4	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi 2 Peningkatan Penegakan Hukum 3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 1 Kampanye edukasi tentang peraturan daerah melalui berbagai media. 2 Pelibatan tokoh masyarakat dan komunitas dalam sosialisasi peraturan daerah. 3 Penyusunan materi edukasi yang menarik dan mudah dipahami. 4 Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah 5 Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi. 6 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. 7 Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang patuh terhadap peraturan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Adapun tujuan dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2026 ini adalah dengan Rencana Kerja Tahunan yang menjabarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Bidang Lingkungan Hidup.

Secara lebih rinci, sasaran renja merupakan target-target spesifik yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sasaran ini dirumuskan dalam bentuk Indikator kinerja yang terukur sehingga pencapaiannya dapat dievaluasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan antara lain :

1. Pemetaan Visi Misi Walikota Dan Wakil Walikota Medan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

V I S I

- Mewujudkan Medan “BERTUAH” yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.
- Secara akar kata, BERTUAH memiliki makna beruntung, sakti, atau keramat. Di masa lampau, kata ini sering dipakai untuk merujuk kepada keberuntungan yang memiliki suatu objek atau dialami seseorang. Seringnya, keberuntungan tersebut tidak terbatas pada satu aspek saja. Predikat bertuah diatribusi kepada seseorang jika dan hanya jika orang tersebut hidup dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harta benda yang melimpah, berkedudukan tinggi, berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta setiap langkahnya terhindar dari mara bahaya dan kesialan. Dikarenakan keistimewaan ini, orang-orang berlomba bersahabat dengan sosok bertuah. Pada banyak kasus, sememangnya demikian: dia yang bertuah akan mentransmisi tuahnya kepada orang sekitarnya. Begitupun, tuah bukan tanpa mahar.
- Dalam persepektif kebudayaan, tuah hanya menghampiri mereka yang berbudi pekerti luhur, yang dengan itu energi-energi positif eksternal tertarik

ke dalam diri mereka (law of attraction).

MISI

- Menjadikan Medan yang BERBUDAYA
- Menjadikan Medan yang ENERGIK
- Menjadikan Medan yang RAMAH
- Menjadikan Medan yang TERTIB
- Menjadikan Medan yang UNGGUL
- Menjadikan Medan yang AMAN
- Menjadikan Medan yang HUMANIS

Dinas Lingkungan Hidup masuk pada misi ke 2 Energik dan Misi ke 4 Tertib, lihat TABEL III.11.

TABEL III.11

Dukungan Terhadap Visi Misi Walikota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Isi	Tujuan/Sasaran/ Program	Outcome	Indikator	Satuan	Tahun 2025							Target Tahun 2026		
					Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Bentuk Intervensi / Dukungan	Target	PHCT	PP NASIONAL	PP PROPINSI	Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Target
Misi Energik	1 Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan yang merata dan berkeadilan melalui penyediaan sarana dan prasarana berkualitas di seluruh wilayah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat		Indeks Infrastruktur	Satuan										
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Terhadap izin Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	90	2.400.000	Tersedianya Informasi Dokumen Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang di fasilitasi dan jumlah perizinan berusaha	200 perusahaan	-	PPN 11 (Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup)	PP 14 (Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana)	90	53.700.000	haan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100	115.070.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan sanksi administratif	100	-	-	PP 14	100	56260000	100
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	15,2	3271602800	Penangan dan pengurangan sampah, koordinasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	96.083 ton	Quick Wins 7	-	PP 14	15,3	3783749500	96.083 ton

Isi	Tujuan/Sasaran/ Program	Outcome	Indikator	Satuan	Tahun 2025						Target Tahun 2026			
					Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Bentuk Intervensi / Dukungan	Target	PHCT	PP NASIONAL	PP PROPINSI	Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Target
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	72	6235875247	Penyusunan Rencana, Pembangunan Optimalisasi dan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	151 TPS/1 TPA	Quick Wins 7	PPN 11	PP 14	71,0	7984587000	151 TPS/1 TPA
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Poin	54,11 77,47	5075724570	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 Doku men	- -	PPN 11	- -	54,21 77,57	5337183492	19 Dokumen
Misi Tertib	2 Mewujudkan Kota Medan yang tertib, nyaman, dan berbudaya taat aturan melalui penataan ruang dan lingkungan hidup, pengelolaan transportasi, kebersihan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. (Beautification City – Estetika Perkotaan)		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*	Persen										
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	90	2.400.000	Tersedianya Informasi Dokumen Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang di fasilitasi dan jumlah perizinan berusaha	200 perusahaan	-	PPN 11	PP 14	90	53.700.000	200 perusahaan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan	Persen	100	115.070.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan sanksi administratif	100	-	-	PP 14	100	56260000	100

Isi	Tujuan/Sasaran/ Program	Outcome	Indikator	Satuan	Tahun 2025						Target Tahun 2026			
					Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Bentuk Intervensi / Dukungan	Target	PHCT	PP NASIONAL	PP PROPINSI	Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Target
			Hidup											
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Persen	6	122369600	Penanaman Pohon Penghijauan di berbagai lokasi dan DED taman	4 Hektar	-	PPN 11	PP 14	6	110233100	4 Hektar
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	15,2	327160280	Penangan dan pengurangan sampah, koordinasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	96.083 ton	Quick Wins 7	PPN 11	PP 14	15,3	378374950	96.083 ton
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	100	151500000	Menyediakan Penyimpanan sementara Limbah B3	100	-	-	-	100	150900000	00
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Poin	54,11	507572457	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 Doku men	-	PPN 11	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	54,21	533718349	19 Dokumen
			Indeks Kualitas Udara		77,47				-			77,57		

Isi	Tujuan/Sasaran/ Program	Outcome	Indikator	Satuan	Tahun 2025						Target Tahun 2026			
					Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Bentuk Intervensi / Dukungan	Target	PHCT	PP NASIONAL	PP PROPINSI	Target Kinerja	Kebutuhan Anggaran	Target
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	70	228754000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	400 Entitas	-	-	PP 14	70	228754000	400 Entitas
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	85	1397095100	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2250	-	-	PP 14	90	1397095100	2250

2. Pencapaian SDGs

o Pencapaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk Dinas Lingkungan Hidup ada 3 Goals dari 11 Goals yang merupakan Tupoksi yaitu Indikator 11.D, 11.E, 11.F, 11.G, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B dan 13.C. Gambaran capaian indikator SDGs untuk Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table III.2.

Tabel III.12
Indikator SDGs untuk I-SIM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Nama Goals / No Indikator	Indikator Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi	
			2022	2023
GOAL 11 (Sustainable Cities and Communities)				
11.D	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.			
11.D.1	Indeks Kualitas Udara			
11.D.1.1	Jumlah partikel kualitas udara SO ₂ (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	17,82 57	20,123 8
11.D.1.2	Jumlah partikel kualitas udara NO ₂ (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	38,98 77	21,428 7
11.D.1.3	Jumlah partikel kualitas udara O ₃ (µg/m ³)	Jumlah partikel kualitas udara O ₃ (µg/m ³). Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	16,39 45	44,717 0
11.D.2	Persentase sampah kota yang terkelola			
11.D.2.1	Jumlah sampah kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) per total sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola)	Jumlah sampah kota yang terkelola (dibuang sesuai dengan alur penanganan sampah mulai dari TPS sampai ke TPA) pertotal sampah dihasilkan (baik yang terkelola dengan yang tidak terkelola)	628.7 49,22	645.66 1,28
11.D.2.2	Jumlah inisiatif bank sampah	Jumlah bank sampah yang dikelola baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan di suatu kota pada tahun pelaporan	26,00	31,00
11.D.3	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Rerata partikulat halus PM 10 pada tahun pelaporan.	21,41 63	28,904 4
11.E	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang			

Nama Goals / No Indikator	Indikator Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi	
			2022	2023
	difabilitas.			
11.E.1	Proporsi ruang terbuka kota untuk semua	Persentase luas ruang terbuka hijau terhadap total luas kota		
11.F	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan PERMENDAGRI No.101/2018			
11.F.1	Memiliki rencana pengurangan bencana daerah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 101/2018	Memiliki rencana pengurangan dampak bencana artinya kota telah memiliki dokumen mengenai rencana pencegahan dan mitigasi yang akan dilakukan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 mengenai standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kota.		
11.G	Total anggaran yang dimaksud adalah semua anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah, dana swasta maupun dari masyarakat. Anggaran pemerintah yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), untuk level nasional. Anggaran pemerintah tersebut terdiri dari anggaran berbagai Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi dana untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi baik berupa belanja langsung maupun belanja program.			
11.G.1	Persentase rumah tangga di kota yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persentase rumah tangga di kota yang terlayani pengelolaan sampah adalah jumlah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di perkotaan secara keseluruhan.	16,77 %	19,51%
GOAL 12 (Responsible Consumption and Production)				
12.A	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal (adaptasi dari green procurement dan budget tagging)			
12.A.1	Kebijakan green procurement	Kebijakan green procurement / pengadaan hijau adalah kebijakan terkait konsumsi / pembelian barang yang memiliki dampak negatif rendah atau malah berdampak positif bagi kesehatan, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup (barang ramah lingkungan). Contoh kebijakan green procurement misalnya pembelian produk berlabel hijau, gedung tersertifikasi hijau, souvenir eco-label, dan catering makanan organik.		
12.A.2	Person in charge dari kebijakan green procurement	Person in charge adalah orang yang bertanggung jawab dalam praktik pengadaan hijau (green procurement).		
12.A.3	Proporsi anggaran pengadaan untuk green procurement (rata-rata seluruh kantor dinas/ APBD) (produk berlabel hijau - misal gedung tersertifikasi hijau, souvenir eco-label, catering makanan organik)	Persentase anggaran untuk pengadaan Green procurement terhadap total anggaran pemda. Green procurement adalah anggaran belanja untuk kegiatan di daerah yang memanfaatkan barang dari supplier lokal , dapat berupa pembelian barang dan jasa. Contoh produk berlabel hijau = gedung tersertifikasi hijau, souvenir eco-label,		

Nama Goals / No Indikator	Indikator Parameter	Deskripsi	Hasil Observasi	
			2022	2023
		catering makanan organik		
12.B	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.			
12.B.1	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola dari sektor industri manufaktur, agroindustri, pertambangan, energi dan migas, prasarana jasa dibagi dengan total timbulan limbah B3 yang dihasilkan dalam kota pada tahun pelaporan.		
12.B.2	Proporsi Limbah Sampah Yang Ditangani / Diolah Berdasarkan Jenis Penanganannya / Pengolahannya.	Variabel Persentase Timbulan Sampah Terkelola diukur menggunakan persamaan sesuai Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018		
GOAL 13 (Climate Action)				
13.A	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara			
13.A.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Penjumlahan yang terdiri dari jumlah korban meninggal, korban hilang, dan korban terkena dampak langsung bencana dibagi dengan jumlah penduduk dan kemudian dikali dengan 100.000		
13.B	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional			
13.B.1	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per jumlah penduduk	5.67 4,67	5.604, 42
13.B.2	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)			
13.B.2.1	Energi	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	4.80 3,43	4.732, 18
13.B.2.2	Limbah	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	534, 79	531,99
13.B.2.3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (Industrial Processes and Product Use, IPPU)	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	60,3 8	60,35
13.B.2.4	Pertanian	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	13,5 7	17,38
13.B.2.5	Kehutanan	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	262, 51	262,51
13.C	Mempunyai rencana atau strategi aksi iklim			
13.C.1	Mempunyai rencana atau strategi aksi iklim	Hal ini dapat mencakup rencana aksi iklim terpadu yang membahas adaptasi iklim, mitigasi iklim dan/atau energi, atau rencana mandiri yang membahas aspek-aspek ini.		

○ **Pengentasan Kemiskinan**

Strategi Penanggulangan kemiskinan yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dengan sasaran warga Kota Medan yang telah memiliki pekerjaan.

Pada tahun 2024 program yang mendukung adalah program

1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
2. Program pengelolaan persampahan dengan kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kota
 - 2) Pengelolaan persampahan

Bedasarkan Tabel III.3 pada tahun 2025 program, kegiatan, sub kegiatan yang mendukung pengentasan kemiskinan tetap dilaksanakan.

TABEL III.13

Matrik Rencana Aksi Tahun 2024 Penanggulangan Kemiskinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

No	Strategi	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi	Target 2024		Sumber Pendanaan
												KINERJA	PAGU (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat													
2	Peningkatan pendapatan masyarakat	Peningkatan Ketrampilan	Warga Kota Medan yang belum memiliki pekerjaan	Orang	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dan terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	655,562,816	APBD Kota Medan
									Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	339,613,248	APBD Kota Medan
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Pengelolaan Sampah		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	288,075,000	APBD Kota Medan
3	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan													

TABEL III. 14

Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan Tahun 2024 TW 1 dan 2

Nomor Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten (Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan)	Kinerja	Indikator	Satuan	Strategi	Lokasi	Penjelasan Pekerjaan	Rencana Kerja 2024		Realisasi Tw 1		Realisasi Tw 2		Sumber Pendanaan
								Jumlah Satuan	Jumlah Pagu (Rp.)	Jumlah Satuan	Jumlah Pagu (Rp.)	Jumlah Satuan	Jumlah Pagu (Rp.)	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup											
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya dan terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan											
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendampingan kepada Komunitas/ Penggiat Lingkungan dan sosialisasi/ pelatihan pengolahan sampah	5	190,561,700	0	Rp -	0	43,340,000	APBD Kota
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Orang	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Perlombaan Bidang Lingkungan Hidup, sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup	1500	504,371,080	0	Rp -	0	-	APBD Kota
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase volume sampah yang terkelola											

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		Terlaksananya pengelolaan timbulan sampah											
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- Peningkatan Kapasitas Bank Sampah - Optimalisasi TPS-3R di Kota Medan	1	387,150,000	0	Rp -	0	-	APBD Kota
TOTAL PAGU									1,082,082,780		Rp -		43,340,000	

1. REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan. Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk Rencana Kerja Tahun 2025 sebanyak 11 program dan 20 kegiatan dan 46 sub kegiatan.
- 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Program umumnya berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Program yang tersebar di Kota Medan, TPA Terjun dan menyebar di Kecamatan diantaranya, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihandan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3. Sedangkan program dan kegiatan yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu adalah Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
- 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan Rencana Kerja Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 sebesar Rp. 70.066.509.958

TABEL III.15

Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp40.056.318.425,00	Rp40.086.318.425,00	Rp30.000.000,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp40.056.318.425,00	Rp40.086.318.425,00	Rp30.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp40.056.318.425,00	Rp40.086.318.425,00	Rp30.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	Rp40.056.318.425,00	Rp40.086.318.425,00	Rp30.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp40.056.318.425,00	Rp40.056.318.425,00	Rp0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	-	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	-	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp6.235.875.247,00	Rp3.632.377.600,00	-Rp2.603.497.647,00
1.03.04.2.01	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.235.875.247,00	Rp3.632.377.600,00	-Rp2.603.497.647,00
.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp800.000.000,00	Rp600.000.000,00	-Rp200.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp800.000.000,00	Rp600.000.000,00	-Rp200.000.000,00
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp2.057.287.647,00	Rp531.650.000,00	-Rp1.525.637.647,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Rp25.000.000,00	Rp0,00	-Rp25.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp1.407.325.147,00	Rp250.000.000,00	-Rp1.157.325.147,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Rp50.000.000,00	Rp0,00	-Rp50.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp305.000.000,00	Rp200.000.000,00	-Rp105.000.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Rp269.962.500,00	Rp81.650.000,00	-Rp188.312.500,00
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Rp713.200.000,00	Rp156.000.000,00	-Rp557.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.200.000,00	Rp0,00	-Rp1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.000.000,00	Rp0,00	-Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp706.000.000,00	Rp156.000.000,00	-Rp550.000.000,00
.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp2.665.387.600,00	Rp2.344.727.600,00	-Rp320.660.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp2.415.387.600,00	Rp2.144.727.600,00	-Rp270.660.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp250.000.000,00	Rp200.000.000,00	-Rp50.000.000,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp81.438.589.693,00	Rp60.081.477.588,00	-Rp21.357.112.105,00
2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT	Rp62.050.000,00	Rp5.400.000,00	-Rp56.650.000,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
	DAERAH			
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp62.050.000,00	Rp5.400.000,00	-Rp56.650.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp18.000.000,00	Rp0,00	-Rp18.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp33.000.000,00	Rp0,00	-Rp33.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp11.050.000,00	Rp5.400.000,00	-Rp5.650.000,00
2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp23.291.595.403,00	Rp22.868.882.578,00	-Rp422.712.825,00
.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp22.955.595.403,00	Rp22.756.562.578,00	-Rp199.032.825,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp7.212.436.454,00	Rp7.009.403.629,00	-Rp203.032.825,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp838.702.480,00	Rp838.702.480,00	Rp0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp701.597.381,00	Rp701.597.381,00	Rp0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp44.375.100,00	Rp44.375.100,00	Rp0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp159.834.172,00	Rp159.834.172,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp140.831.533,00	Rp140.831.533,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp38.500.000,00	Rp38.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp274.002.332,00	Rp274.002.332,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp49.742.000,00	Rp49.742.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp383.861.267,00	Rp383.861.267,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp56.810.600,00	Rp56.810.600,00	Rp0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp16.649.469,00	Rp20.649.469,00	Rp4.000.000,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp159.738,00	Rp159.738,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp46.871,00	Rp46.871,00	Rp0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Rp701.097.441,00	Rp701.097.441,00	Rp0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp100.532.590,00	Rp100.532.590,00	Rp0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp27.027.924,00	Rp27.027.924,00	Rp0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp14.137.200,00	Rp14.137.200,00	Rp0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp64.023.848,00	Rp64.023.848,00	Rp0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	Rp11.781.000,00	Rp11.781.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp74.351.489,00	Rp74.351.489,00	Rp0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp8.750.885.601,00	Rp8.750.885.601,00	Rp0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp238.000.000,00	Rp238.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp2.811.608.913,00	Rp2.811.608.913,00	Rp0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp238.000.000,00	Rp238.000.000,00	Rp0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp336.000.000,00	Rp112.320.000,00	-Rp223.680.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp319.680.000,00	Rp96.000.000,00	-Rp223.680.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp16.320.000,00	Rp16.320.000,00	Rp0,00
2.11.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp811.890.000,00	Rp0,00	-Rp811.890.000,00
.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp424.390.000,00	Rp0,00	-Rp424.390.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp75.000.000,00	Rp0,00	-Rp75.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			-Rp68.750.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp280.640.000,00	Rp0,00	-Rp280.640.000,00
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp242.500.000,00	Rp0,00	-Rp242.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp202.500.000,00	Rp0,00	-Rp202.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp40.000.000,00	Rp0,00	-Rp40.000.000,00
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp145.000.000,00	Rp0,00	-Rp145.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp145.000.000,00	Rp0,00	-Rp145.000.000,00
2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp22.406.771.869,00	Rp16.182.739.440,00	-Rp6.224.032.429,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp25.987.960,00	Rp16.230.638,00	-Rp9.757.322,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp25.987.960,00	Rp16.230.638,00	-Rp9.757.322,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp149.993.050,00	Rp149.993.050,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp72.345.000,00	Rp72.345.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp10.475.100,00	Rp10.475.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp1.066.000,00	Rp1.066.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp26.858.000,00	Rp26.858.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Rp36.973.950,00	Rp36.973.950,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp2.275.000,00	Rp2.275.000,00	Rp0,00
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp52.888.125,00	Rp43.521.505,00	-Rp9.366.620,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp52.888.125,00	Rp43.521.505,00	-Rp9.366.620,00
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp20.561.904.084,00	Rp15.098.568.722,00	-Rp5.463.335.362,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp19.829.112.148,00	Rp14.365.776.786,00	-Rp5.463.335.362,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp50.670.516,00	Rp50.670.516,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp46.270.420,00	Rp46.270.420,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp615.485.000,00	Rp615.485.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp17.966.000,00	Rp17.966.000,00	Rp0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp303.279.750,00	Rp175.634.625,00	-Rp127.645.125,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp294.023.250,00	Rp166.378.125,00	-Rp127.645.125,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.996.500,00	Rp1.996.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp7.260.000,00	Rp7.260.000,00	Rp0,00
.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Rp60.000.000,00	Rp0,00	-Rp60.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp60.000.000,00	Rp0,00	-Rp60.000.000,00
.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp70.950.600,00	Rp50.950.600,00	-Rp20.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp70.950.600,00	Rp50.950.600,00	-Rp20.000.000,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp541.768.300,00	Rp413.840.300,00	-Rp127.928.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp157.984.300,00	Rp157.984.300,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp383.784.000,00	Rp255.856.000,00	-Rp127.928.000,00
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp640.000.000,00	Rp234.000.000,00	-Rp406.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp490.000.000,00	Rp234.000.000,00	-Rp256.000.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Rp150.000.000,00	Rp0,00	-Rp150.000.000,00
2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp14.710.556.048,00	Rp4.345.142.700,00	-Rp10.365.413.348,00
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp8.873.773.000,00	Rp4.114.674.000,00	-Rp4.759.099.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp37.200.000,00	Rp0,00	-Rp37.200.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp945.000.000,00	Rp0,00	-Rp945.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	Rp7.891.573.000,00	Rp4.114.674.000,00	-Rp3.776.899.000,00
2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Rp4.680.000.000,00	Rp0,00	-Rp4.680.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	Rp4.680.000.000,00	Rp0,00	-Rp4.680.000.000,00
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.156.783.048,00	Rp230.468.700,00	-Rp926.314.348,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp5.941.100,00	Rp0,00	-Rp5.941.100,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp13.617.750,00	Rp0,00	-Rp13.617.750,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	Rp3.023.790,00	Rp0,00	-Rp3.023.790,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp172.758.960,00	Rp0,00	-Rp172.758.960,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp6.443.250,00	Rp0,00	-Rp6.443.250,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp152.188.938,00	Rp0,00	-Rp152.188.938,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp98.219.700,00	Rp29.729.700,00	-Rp68.490.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp520.508.500,00	Rp142.840.500,00	-Rp377.668.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp184.081.060,00	Rp57.898.500,00	-Rp126.182.560,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp8.066.185.690,00	Rp7.975.458.515,00	-Rp90.727.175,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp31.400.000,00	Rp31.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp31.400.000,00	Rp31.400.000,00	Rp0,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp300.487.575,00	Rp300.487.575,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp65.000.000,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp231.438.439,00	Rp231.438.439,00	Rp0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	Rp4.049.136,00	Rp4.049.136,00	Rp0,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp7.734.298.115,00	Rp7.643.570.940,00	-Rp90.727.175,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp7.382.648.115,00	Rp7.581.680.940,00	Rp199.032.825,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp351.650.000,00	Rp61.890.000,00	-Rp289.760.000,00
2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp11.981.540.683,00	Rp8.629.854.355,00	-Rp3.351.686.328,00
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp226.280.000,00	Rp0,00	-Rp226.280.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp226.280.000,00	Rp0,00	-Rp226.280.000,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp9.967.610.000,00	Rp7.774.161.605,00	-Rp2.193.448.395,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Rp7.500.000.000,00	Rp6.527.121.605,00	-Rp972.878.395,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp1.141.420.000,00	Rp625.940.000,00	-Rp515.480.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp1.076.190.000,00	Rp371.100.000,00	-Rp705.090.000,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp401.700.000,00	Rp316.000.000,00	-Rp85.700.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp249.700.000,00	Rp235.000.000,00	-Rp14.700.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp73.000.000,00	Rp36.500.000,00	-Rp36.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp69.000.000,00	Rp34.500.000,00	-Rp34.500.000,00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.122.520.683,00	Rp317.092.750,00	-Rp805.427.933,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp1.049.920.683,00	Rp286.842.750,00	-Rp763.077.933,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Rp72.600.000,00	Rp30.250.000,00	-Rp42.350.000,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp263.430.000,00	Rp222.600.000,00	-Rp40.830.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp97.600.000,00	Rp97.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	Rp15.830.000,00	Rp0,00	-Rp15.830.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp25.000.000,00	-Rp25.000.000,00
2.11.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	Rp108.000.000,00	Rp74.000.000,00	-Rp34.000.000,00
2.11.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp108.000.000,00	Rp74.000.000,00	-Rp34.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp68.000.000,00	Rp34.000.000,00	-Rp34.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp578.834.320,00	Rp195.600.000,00	-Rp383.234.320,00
2.11.02.2.01	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	Rp243.600.000,00	Rp195.600.000,00	-Rp48.000.000,00
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp243.600.000,00	Rp195.600.000,00	-Rp48.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp240.000.000,00	Rp192.000.000,00	-Rp48.000.000,00
2.11.02.2.02	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	Rp335.234.320,00	Rp0,00	-Rp335.234.320,00
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp335.234.320,00	Rp0,00	-Rp335.234.320,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.484.320,00	Rp0,00	-Rp3.484.320,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp11.250.000,00	Rp0,00	-Rp11.250.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp82.500.000,00	Rp0,00	-Rp82.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp238.000.000,00	Rp0,00	-Rp238.000.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp5.075.724.570,00	Rp2.254.631.140,00	-Rp2.821.093.430,00
2.11.03.2.01	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Rp4.719.784.170,00	Rp2.252.831.140,00	-Rp2.466.953.030,00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp3.041.462.630,00	Rp1.303.748.600,00	-Rp1.737.714.030,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp29.588.530,00	Rp6.300.000,00	-Rp23.288.530,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp24.750.000,00	Rp0,00	-Rp24.750.000,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.800.000,00	Rp0,00	-Rp1.800.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp108.000.000,00	Rp0,00	-Rp108.000.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	Rp8.046.500,00	Rp5.747.500,00	-Rp2.299.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp412.500.000,00	Rp0,00	-Rp412.500.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp4.458.850,00	Rp2.069.100,00	-Rp2.389.750,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.200.000,00	Rp0,00	-Rp10.200.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp28.752.000,00	Rp0,00	-Rp28.752.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp41.400.000,00	Rp0,00	-Rp41.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp52.900.000,00	Rp0,00	-Rp52.900.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Rp218.500.000,00	Rp196.000.000,00	-Rp22.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp550.000.000,00	Rp325.000.000,00	-Rp225.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp200.000.000,00	Rp0,00	-Rp200.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp3.300.000,00	Rp0,00	-Rp3.300.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	Rp6.000.000,00	Rp0,00	-Rp6.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp21.144.750,00	Rp0,00	-Rp21.144.750,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Rp750.232.000,00	Rp668.632.000,00	-Rp81.600.000,00
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Rp275.000.000,00	Rp0,00	-Rp275.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp30.000.000,00	Rp0,00	-Rp30.000.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	Rp64.890.000,00	Rp0,00	-Rp64.890.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	Rp200.000.000,00	Rp100.000.000,00	-Rp100.000.000,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp464.156.540,00	Rp105.062.540,00	-Rp359.094.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.188.950,00	Rp3.474.950,00	-Rp2.714.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp45.000.000,00	Rp0,00	-Rp45.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp101.900.000,00	Rp19.400.000,00	-Rp82.500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp41.080.000,00	Rp27.400.000,00	-Rp13.680.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp14.800.000,00	Rp0,00	-Rp14.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp400.000,00	Rp0,00	-Rp400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp18.787.590,00	Rp18.787.590,00	Rp0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	Rp200.000.000,00	Rp0,00	-Rp200.000.000,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp1.214.165.000,00	Rp844.020.000,00	-Rp370.145.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp34.970.000,00	Rp30.420.000,00	-Rp4.550.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp144.000.000,00	Rp144.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp643.600.000,00	Rp643.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp14.400.000,00	Rp0,00	-Rp14.400.000,00
5.2.02.08.01.0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	Rp377.195.000,00	Rp26.000.000,00	-Rp351.195.000,00
2.11.03.2.02	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Rp340.040.400,00	Rp900.000,00	-Rp339.140.400,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp340.040.400,00	Rp900.000,00	-Rp339.140.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.455.400,00	Rp900.000,00	-Rp2.555.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp73.750.000,00	Rp0,00	-Rp73.750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp169.185.000,00	Rp0,00	-Rp169.185.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp57.300.000,00	Rp0,00	-Rp57.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp6.350.000,00	Rp0,00	-Rp6.350.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp30.000.000,00	Rp0,00	-Rp30.000.000,00
2.11.03.2.03	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Rp15.900.000,00	Rp900.000,00	-Rp15.000.000,00
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Rp15.900.000,00	Rp900.000,00	-Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.000.000,00	Rp0,00	-Rp15.000.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp1.223.696.000,00	Rp566.860.000,00	-Rp656.836.000,00
2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	Rp1.223.696.000,00	Rp566.860.000,00	-Rp656.836.000,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp471.756.000,00	Rp265.180.000,00	-Rp206.576.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp399.806.000,00	Rp199.880.000,00	-Rp199.926.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp17.700.000,00	Rp17.100.000,00	-Rp600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp48.200.000,00	Rp48.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Rp6.050.000,00	Rp0,00	-Rp6.050.000,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Rp751.940.000,00	Rp301.680.000,00	-Rp450.260.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp199.880.000,00	Rp199.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.260.000,00	Rp0,00	-Rp10.260.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp90.000.000,00	Rp0,00	-Rp90.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Rp250.000.000,00	Rp100.000.000,00	-Rp150.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Rp200.000.000,00	Rp0,00	-Rp200.000.000,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp151.500.000,00	Rp101.500.000,00	-Rp50.000.000,00
2.11.05.2.01	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	Rp151.500.000,00	Rp101.500.000,00	000.000,00
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp151.500.000,00	Rp101.500.000,00	-Rp50.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp150.000.000,00	Rp100.000.000,00	-Rp50.000.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp53.700.000,00	Rp1.200.000,00	-Rp52.500.000,00
2.11.06.2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp53.700.000,00	Rp1.200.000,00	-Rp52.500.000,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp0,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp53.400.000,00	Rp900.000,00	-Rp52.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp52.500.000,00	Rp0,00	-Rp52.500.000,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp1.397.095.100,00	Rp999.771.510,00	-Rp397.323.590,00
2.11.08.2.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp1.397.095.100,00	Rp999.771.510,00	-Rp397.323.590,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp485.208.900,00	Rp244.341.900,00	-Rp240.867.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp10.381.800,00	Rp10.381.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.255.600,00	Rp11.255.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp12.705.000,00	Rp12.705.000,00	Rp0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp165.000.000,00	Rp0,00	-Rp165.000.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp600.000,00	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp164.217.000,00	Rp88.350.000,00	-Rp75.867.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp89.250.000,00	Rp89.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp31.399.500,00	Rp31.399.500,00	Rp0,00
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp911.886.200,00	Rp755.429.610,00	-Rp156.456.590,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.648.700,00	Rp9.648.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp32.780.000,00	Rp110.000,00	-Rp32.670.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp22.435.000,00	Rp3.440.000,00	-Rp18.995.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp300.000,00	Rp0,00	-Rp300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp107.100.000,00	Rp107.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp31.250.000,00	Rp0,00	-Rp31.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp10.550.000,00	Rp10.550.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp265.000.000,00	Rp191.758.410,00	-Rp73.241.590,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp75.322.500,00	Rp75.322.500,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp336.500.000,00	Rp336.500.000,00	Rp0,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp228.754.000,00	Rp96.490.000,00	-Rp132.264.000,00
2.11.09.2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp228.754.000,00	Rp96.490.000,00	-Rp132.264.000,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp228.754.000,00	Rp96.490.000,00	-Rp132.264.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp7.540.000,00	Rp7.540.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp49.500.000,00	Rp0,00	-Rp49.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp117.564.000,00	Rp34.800.000,00	-Rp82.764.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp54.150.000,00	Rp54.150.000,00	Rp0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp115.070.000,00	Rp55.070.000,00	-Rp60.000.000,00
2.11.10.2.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	Rp115.070.000,00	Rp55.070.000,00	-Rp60.000.000,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Rp84.170.000,00	Rp54.170.000,00	-Rp30.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp310.000,00	Rp310.000,00	Rp0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Rp23.860.000,00	Rp23.860.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp30.000.000,00	Rp0,00	-Rp30.000.000,00
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp30.900.000,00	Rp900.000,00	-Rp30.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp30.000.000,00	Rp0,00	-Rp30.000.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp3.270.402.800,00	Rp2.081.532.120,00	-Rp1.188.870.680,00
2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH	Rp3.270.402.800,00	Rp2.081.532.120,00	-Rp1.188.870.680,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp1.101.200.000,00	Rp839.084.320,00	-Rp262.115.680,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp650.000.000,00	Rp487.884.320,00	-Rp162.115.680,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp450.000.000,00	Rp350.000.000,00	-Rp100.000.000,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp1.332.234.800,00	Rp959.979.800,00	-Rp372.255.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp897.000.000,00	Rp524.745.000,00	-Rp372.255.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp435.234.800,00	Rp435.234.800,00	Rp0,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Rp835.768.000,00	Rp281.268.000,00	-Rp554.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.200.000,00	Rp0,00	-Rp1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.000.000,00	Rp0,00	-Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp236.000.000,00	Rp0,00	-Rp236.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00	-Rp50.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	Rp261.300.000,00	Rp0,00	-Rp261.300.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp131.268.000,00	Rp131.268.000,00	Rp0,00
	TOTAL BELANJA	Rp99.769.241.730,00	Rp70.066.509.958,00	-Rp29.702.731.772,00

TABLE III.16 (TC. 33)

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Medan

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			138.812.378.140,00				74.036.289.467,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 3.859.064.400,00		3.859.064.400,00				3.443.905.152,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp. 331.650.000,00		3.859.064.400,00				3.443.905.152,00
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp. 216.000.000,00	72 %	3.859.064.400,00			-	3.443.905.152,00
	[Meningkatkan Layanan Persampahan Regional]	Rp. 2.711.414.400,00	-	3.859.064.400,00	-	-	-	3.443.905.152,00
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 600.000.000,00	72 %	3.859.064.400,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	3.443.905.152,00
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS							
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1300 Ton/hari	331.650.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1339	338.283.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan							
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	7 Dokumen	216.000.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	7	102.000.000,00
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS							

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
		<i>Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi</i>	1 Unit	2.711.414.400,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	2	2.391.622.152,00
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R								
		<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun</i>	1300 Ton/hari	600.000.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1339	612.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			134.953.313.740				70.592.384.315,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			134.953.313.740				70.592.384.315,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Sakip Perangkat Daerah</i>	BB Huruf	102.742.419.942,00			-	60.408.217.140,00
	[Nilai Sakip Perangkat Daerah]	-	-	102.742.419.942,00	-	-	-	60.408.217.140,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</i>	100 %	437.400.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	5.400.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	437.400.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	3	5.400.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</i>	100 %	33.844.969.840,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	23.067.915.403,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	135 Orang/bulan	33.763.471.090,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	135	22.955.595.403,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	81.498.750,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	12	112.320.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</i>	100 %	17.923.251.425,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	16.212.409.307,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	13.502.910,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	16.627.218,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	559.883.337,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	2	167.922.450,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	44.758.273,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	43.521.505,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	16.166.062.440,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	6	15.101.180.492,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	212.901.265,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	3	177.379.232,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	50 Laporan	52.295.400,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	50	51.460.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	150 Laporan	83.847.800,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	150	417.978.410,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	390.000.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	236.340.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU</i>	100 %	5.139.401.611,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	4.388.594.122,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	28 Unit	4.334.741.400,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	20	4.155.820.740,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	56 Unit	804.660.211,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	136	232.773.382,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	36.277.450.653,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	7.854.122.074,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2 Laporan	31.308.750,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	31.714.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan	1.029.929.643,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	3	303.425.448,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	13 Laporan	35.216.212.260,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	13	7.518.982.626,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan</i>	100 %	8.963.946.413,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	8.785.376.234,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	29 Unit	8.169.443.913,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	6	7.851.903.221,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	160 Unit	320.962.500,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	200	340.673.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	318.750.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	3	343.330.013,00
	-	-	-	60.122.375.909,00	-	-	-	63.851.556.450,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	82 Unit	154.790.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	82	249.470.000,00
	[Nilai Sakip Perangkat Daerah]	-	-	60.122.375.909,00	-	-	-	63.851.556.450,00
	Penataan Organisasi	<i>Persentase cakupan penataan organisasi</i>	100 %	156.000.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	94.400.000,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	40 Dokumen	156.000.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	40	94.400.000,00
2,	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti</i>	100 %	251.927.250,00			-	397.274.006,00
	[Meningkatkan Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP]	-	-	251.927.250,00	-	-	-	397.274.006,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia</i>	2 Dokumen	108.113.625,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	199.512.000,00
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota							
		<i>jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>	2 Dokumen	108.113.625,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	4	199.512.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai</i>	1 Dokumen	143.813.625,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	197.762.006,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD							
		<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	1 Dokumen	143.813.625,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	197.762.006,00
3,	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara</i>	54.11 % 77.47 %	2.931.409.850,00			-	2.299.723.763,00
	[Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	-	-	2.931.409.850,00	-	-	-	2.299.723.763,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia</i>	4 Dokumen	2.929.382.600,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	2.297.887.763,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	8 Dokumen	2.016.003.850,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	11	1.329.829.616,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	1 Dokumen	69.378.750,00	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	5	107.157.747,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							
		<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	3 Dokumen	844.000.000,00	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	3	860.900.400,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia</i>	4 Dokumen	1.013.625,00	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	918.000,00
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat							
		<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan</i>	2 Laporan	1.013.625,00	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	2	918.000,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan</i>	20 %	1.013.625,00	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	918.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan</i>	4 Dokumen	1.013.625,00	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	918.000,00
4,	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	6 Indeks	25.518.313.812,00			-	578.197.200,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
	[Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	-	-	25.518.313.812,00	-	-	-	578.197.200,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Dengan Baik</i>	4 Ha	25.518.313.812,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	578.197.200,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	3 Ha	19.518.631.267,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	3	270.483.600,00
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati							
				5.587.133.795,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru		0
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan								
		<i>Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Unit	412.548.750,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	307.713.600,00
5,	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase Limbah B3 yang Terkelola</i>	100 %	128.813.625,00			-	103.530.000,00
	[Meningkatkan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)]	-	-	128.813.625,00	-	-	-	103.530.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3</i>	100 %	128.813.625,00	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	103.530.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)							
		<i>Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)</i>	1 Dokumen	128.813.625,00	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	103.530.000,00
6,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH</i>	90 %	1.332.375,00			-	1.224.000,00
	[Meningkatkan Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan]	-	-	1.332.375,00	-	-	-	1.224.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</i>	50 %	1.332.375,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	1.224.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							
		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	40 Dokumen	318.750,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	40	306.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	200 Badan Usaha	1.013.625,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	205	918.000,00
7,	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	85 %	977.803.887,00			-	1.019.766.940,00
	[Meningkatkan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup]	-	-	977.803.887,00	-	-	-	1.019.766.940,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana</i>	1 Kegiatan	977.803.887,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	1.019.766.940,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup							
		<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	1 Dokumen	214.041.585,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	8	249.228.804,00
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup							
		<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>	2250 Orang	763.762.302,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	2250	770.538.136,00
8,	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	70 %	409.528.480,00			-	98.419.800,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
	[Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]	-	-	409.528.480,00	-	-	-	98.419.800,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 Kegiatan	409.528.480,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	98.419.800,00
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	400 Entitas	101.854.875,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	400	98.419.800,00
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100 %	176.446.230,00			-	56.171.400,00
	[Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup]	-	-	176.446.230,00	-	-	-	56.171.400,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50 %	176.446.230,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	56.171.400,00
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota								
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	50 Pengaduan	175.432.605,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	55	55.253.400,00
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
		<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	50 Sanksi	1.013.625,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	55	918.000,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	15.2 %	1.815.318.289,00			-	2.186.520.756,00
	[Meningkatnya Tata Kelola ersampahan]	-	-	1.815.318.289,00	-	-	-	2.186.520.756,00
	Pengelolaan Sampah	<i>Timbulan sampah yang terkelola</i>	76 %	1.815.318.289,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	-	2.186.520.756,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								
		<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	10 Kelompok	396.946.189,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	12	919.238.756,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>	1 Dokumen	1.112.389.500,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	4	979.165.000,00
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					NASIONAL	DAERAH		
		<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>	82125 Ton	1.351.500,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	106763	1.224.000,00
	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah							
		<i>Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah</i>	1 Laporan	304.631.100,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	1	286.893.000,00
				138.812.378.140,00				74.036.289.467,00

4.1 Program dan Kegiatan

Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk Rencana Kerja Tahun 2026 sebanyak 11 program, dimana 1 (satu) program Administrasi (pendukung) dan 10 (sepuluh) program Prioritas. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
- c. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- d. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPA-3R

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penataan Organisasi

- a. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- III. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**
 - 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**
 - a. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
 - 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
- V. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
 - 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- VI. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**
 - 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3**
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan

VII. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VIII. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

IX. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

X. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan Sampah

- a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- c. Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan
- d. Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah

**TABEL IV.1
RENCANA KERJA 2026**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	R.APBD TA 2026	EFISIENSI R.APBDTA 2026	APBD 2026
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	Penggabungan Kehati
1.03.04	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp3.590.650.062,00	Rp3.590.650.062,00	Rp. 3.859.064.400,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/ Kota	Rp3.590.650.062,00	Rp3.590.650.062,00	Rp. 3.859.064.400,00
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPA-3R/ TPS	Rp331.650.000,00	Rp331.650.000,00	Rp. 331.650.000,00
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan	Rp137.400.000,00	Rp137.400.000,00	Rp. 216.000.000,00
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/ TPST/ SPA/ TPA-3R/ TPS	Rp2.521.600.062,00	Rp2.521.600.062,00	Rp. 2.711.414.400,00
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPA-3R	Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp. 600.000.000,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp60.136.298.751,00	Rp57.062.606.213,00	Rp. 102.742.419.942,00
2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp. 437.400.000,00
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp. 437.400.000,00
2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp20.696.511.944,00	Rp20.696.511.944,00	Rp. 33.844.969.840,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp20.615.013.194,00	Rp20.615.013.194,00	Rp. 33.763.471.090,00
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp81.498.750,00	Rp81.498.750,00	Rp. 81.498.750,00
2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp16.215.452.544,00	Rp13.472.907.084,00	Rp. 17.923.251.425,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp13.502.910,00	Rp13.502.910,00	Rp. 13.502.910,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp148.874.337,00	Rp148.874.337,00	Rp. 559.883.337,00
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp44.758.273,00	Rp44.758.273,00	Rp. 44.758.273,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	R.APBD TA 2026	EFISIENSI R.APBDTA 2026	APBD 2026
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	Penggabungan Kehati
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp15.046.539.059,00	Rp12.303.993.599,00	Rp. 16.166.062.440,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp198.034.765,00	Rp198.034.765,00	Rp. 212.901.265,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp52.295.400,00	Rp52.295.400,00	Rp. 52.295.400,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp477.447.800,00	Rp477.447.800,00	Rp. 483.847.800,00
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp234.000.000,00	Rp234.000.000,00	Rp. 390.000.000,00
2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp4.600.234.641,00	Rp4.600.234.641,00	Rp. 5.139.401.611,00
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp4.334.741.400,00	Rp4.334.741.400,00	Rp. 4.334.741.400,00
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp265.493.241,00	Rp265.493.241,00	Rp. 804.660.211,00
2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp9.948.851.126,00	Rp9.968.666.131,00	Rp. 36.277.450.653,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp31.308.750,00	Rp31.308.750,00	Rp. 31.308.750,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp937.017.936,00	Rp956.832.941,00	Rp. 1.029.929.643,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp8.980.524.440,00	Rp8.980.524.440,00	Rp. 35.216.212.260,00
2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp8.588.848.496,00	Rp8.237.886.413,00	Rp. 8.963.946.413,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp7.794.345.996,00	Rp7.443.383.913,00	Rp. 8.169.443.913,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp320.962.500,00	Rp320.962.500,00	Rp. 320.962.500,00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp318.750.000,00	Rp318.750.000,00	Rp. 318.750.000,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	R.APBD TA 2026	EFISIENSI R.APBDTA 2026	APBD 2026
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	Penggabungan Kehati
2.11.01 2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 154.790.000,00
2.11.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	Rp81.000.000,00	Rp81.000.000,00	Rp. 156.000.000,00
2.11.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp81.000.000,00	Rp81.000.000,00	Rp. 156.000.000,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp335.227.250,00	Rp335.227.250,00	Rp. 251.927.250,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Rp143.813.625,00	Rp143.813.625,00	Rp. 108.113.625,00
2.11.01.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp143.813.625,00	Rp143.813.625,00	Rp. 108.113.625,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Rp191.413.625,00	Rp191.413.625,00	Rp. 143.813.625,00
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Rp191.413.625,00	Rp191.413.625,00	Rp. 143.813.625,00
5.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp2.921.059.850,00	Rp2.921.059.850,00	Rp. 2.931.409.850,00
2.11.03.2.01	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Rp2.919.032.600,00	Rp2.919.032.600,00	Rp. 2.929.382.600,00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp1.961.653.850,00	Rp1.961.653.850,00	Rp. 2.016.003.850,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp113.378.750,00	Rp113.378.750,00	Rp. 69.378.750,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp844.000.000,00	Rp844.000.000,00	Rp. 844.000.000,00
2.11.03.2.02	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Rp1.013.625,00	Rp1.013.625,00	Rp. 1.013.625,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	R.APBD TA 2026	EFISIENSI R.APBDTA 2026	APBD 2026
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	Penggabungan Kehati
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp1.013.625,00	Rp1.013.625,00	Rp. 1.013.625,00
2.11.03.2.03	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/ KOTA	Rp1.013.625,00	Rp1.013.625,00	Rp. 1.013.625,00
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Rp1.013.625,00	Rp1.013.625,00	Rp. 1.013.625,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp599.044.270,00	Rp599.044.270,00	Rp. 25.518.313.812,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp599.044.270,00	Rp599.044.270,00	Rp. 25.518.313.812,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp219.495.520,00	Rp219.495.520,00	Rp. 19.518.631.267,00
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp0,00	Rp0,00	Rp. 5.587.133.795,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Rp379.548.750,00	Rp379.548.750,00	Rp. 412.548.750,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp128.813.625,00	Rp128.813.625,00	Rp. 128.813.625,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp128.813.625,00	Rp128.813.625,00	Rp. 128.813.625,00
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Rp128.813.625,00	Rp128.813.625,00	Rp. 128.813.625,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp1.332.375,00	Rp1.332.375,00	Rp. 1.332.375,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	R.APBD TA 2026	EFISIENSI R.APBDTA 2026	APBD 2026
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	Penggabungan Kehati
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.332.375,00	Rp1.332.375,00	Rp. 1.332.375,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp318.750,00	Rp318.750,00	Rp. 318.750,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp1.013.625,00	Rp1.013.625,00	Rp. 1.013.625,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp1.041.433.280,00	Rp1.041.433.280,00	Rp. 977.803.887,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.041.433.280,00	Rp1.041.433.280,00	Rp. 977.803.887,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp257.484.596,00	Rp257.484.596,00	Rp. 214.041.585,00
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp783.948.684,00	Rp783.948.684,00	Rp. 763.762.302,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp101.973.075,00	Rp101.973.075,00	Rp. 409.528.480,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp101.973.075,00	Rp101.973.075,00	Rp. 409.528.480,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp101.973.075,00	Rp101.973.075,00	Rp. 409.528.480,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp71.027.250,00	Rp71.027.250,00	Rp. 176.446.230,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	R.APBD TA 2026	EFISIENSI R.APBDTA 2026	APBD 2026
		PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	Penggabungan Kehati
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp71.027.250,00	Rp71.027.250,00	Rp. 176.446.230,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Rp70.013.625,00	Rp70.013.625,00	Rp. 175.432.605,00
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp1.013.625,00	Rp1.013.625,00	Rp. 1.013.625,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp1.814.050.170,00	Rp1.814.050.170,00	Rp. 1.815.318.289,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Rp1.814.050.170,00	Rp1.814.050.170,00	Rp. 1.815.318.289,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp504.204.500,00	Rp504.204.500,00	Rp. 396.946.189,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	Rp1.003.863.070,00	Rp1.003.863.070,00	Rp. 1.112.389.500,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp1.351.500,00	Rp1.351.500,00	Rp. 1.351.500,00
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan Sampah melalui Pembatasan timbulan Sampah	Rp304.631.100,00	Rp304.631.100,00	Rp. 304.631.100,00
TOTAL BELANJA		Rp70.740.909.958,00	Rp67.667.217.420,00	Rp. 138.812.378.140,00
PAGU VALIDASI		Rp70.740.909.958,00	Rp67.667.217.420,00	Rp. 138.812.378.140,00

4.2. PENERAPAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN MENJADI ENERGI TERBARUKAN DENGAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

Pengelolaan sampah perkotaan berbasis energi terbarukan (Waste-to-Energy/WtE) adalah sistem yang mengubah sampah menjadi energi—seperti listrik, panas, atau bahan bakar—dengan meminimalkan dampak lingkungan. Pendekatan ini menjadi solusi penting bagi kota-kota besar yang menghadapi permasalahan volume sampah dan kebutuhan energi.

Perpres 109 tahun 2025, yang mengatur Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan (PSE) berbasis teknologi ramah lingkungan, bertujuan mengatasi darurat sampah perkotaan dengan mengubah sampah jadi listrik/energi, mendorong investasi melalui skema tarif listrik tetap dan penghapusan tipping fee, serta mempercepat implementasi fasilitas waste-to-energy (WTE).

Menarik kewenangan dari daerah ke pusat untuk mempercepat proses, dengan dukungan investasi hijau. Fokus Lokasi: Diutamakan di kota metropolitan dan besar dengan timbulan sampah >1000 ton/hari. Skema Ekonomi: Menetapkan harga listrik tetap 20 sen/kWh, menghilangkan tipping fee (biaya kelola sampah) yang ditanggung pemerintah pusat, dan memberikan kepastian bagi investor. Kewajiban Daerah : Menyediakan lahan dan menganggarkan APBD untuk pengumpulan & pengangkutan sampah ke lokasi PSEL (Pembangkit Listrik Sampah), dengan lahan dikelola pinjam pakai tanpa biaya awal. Teknologi: Menggunakan teknologi modern seperti insinerasi.

Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan membangun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini merupakan rencana kerja tahunan dan ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman bagi segenap aparatur untuk melaksanakan kegiatan dan memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2026 yang telah disusun Tahun Anggaran 2025 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mempunyai arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan dan apa yang akan dikerjakan dalam satu tahun ini nantinya dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam perjalanan waktu, tidak tertutup kemungkinan Rencana Kerja ini akan mengalami perubahan mungkin dapat dikarenakan beberapa faktor misalnya peraturan dari pusat, kebijakan-kebijakan bidang lingkungan hidup, kebutuhan/kepentingan organisasi yang perlu adanya penyesuaian dengan kondisi yang ada. Namun demikian akan diupayakan agar perubahan-perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh dari garis besar perencanaan yang telah disusun.